



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2025



PROFIL PIMPINAN



Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.
Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun



Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengadilan Negeri Simalungun

KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu nammo buddhaya,
Salam kebajikan,*

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 selesai disusun. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas atas aktualisasi kinerja Pengadilan Negeri Simalungun selama tahun 2025 kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan efektif.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 ini merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B dalam satu tahun terakhir. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Simalungun kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025, kami sampaikan semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk lebih terpacu menjadi lebih optimal dalam melaksanakan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum pada tahun 2025, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kabupaten Simalungun khususnya dan di Indonesia pada umumnya, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

*Salam Sehat, Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatu,
Om santi santi om*
Pengadilan Negeri Simalungun, BERAKSI !

Simalungun, 21 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

I	PROFIL PIMPINAN
II	KATA PENGANTAR
III	DAFTAR ISI
V	DAFTAR TABEL
VII	DAFTAR GAMBAR

I PENDAHULUAN

2	Kebijakan Umum Peradilan
5	Visi dan Misi
6	Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Simalungun
7	Budaya Kerja
8	Motto
9	Rencana Strategis (Renstra)

II KEADAAN PERKARA

12	Keadaan Perkara
16	Penyelesaian Perkara
16	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu
17	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
19	Jumlah Perkara Pidana Yang Berhasil Restorative Justice (RJ)
19	Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi
20	Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diversi
22	Program Prioritas Nasional
22	Posbakum
23	Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
23	Perkara Prodeo

III SUMBER DAYA MANUSIA

- 31 Mutasi
- 33 Promosi
- 33 Pensiun
- 34 Diklat

IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- 42 Pengelolaan Keuangan
- 51 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- 53 Pengelolaan Teknologi Informasi

V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- 60 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
- 72 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 74 Inovasi Pelayanan Publik

VI PENGAWASAN

- 84 Pengawasan Internal
- 85 Pengawasan Eksternal

VII PENUTUP

- 89 Kesimpulan
- 90 Rekomendasi

VIII LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

- 1 *Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025*
- 2 *Implementasi E-Court Tahun 2025*
- 3 *Keadaan Perkara Pidana Tahun 2025*
- 4 *Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2025*
- 5 *Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2025*
- 6 *Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2025*
- 7 *Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2025*
- 8 *Keadaan Perkara Perdata PK Tahun 2025*
- 9 *Keadaan Perkara Pidana PK Tahun 2025*
- 10 *Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diputus*
- 11 *Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diputus*
- 12 *Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*
- 13 *Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*
- 14 *Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*
- 15 *Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*
- 16 *Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK*
- 17 *Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK*
- 18 *Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restorative Justice (RJ)*
- 19 *Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi*
- 20 *Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi*
- 21 *Jumlah Perkara Perdata yang didaftarkan melalui e-Court*
- 22 *Keadaan Perkara Perdata yang didaftarkan melalui e-Court*
- 23 *Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2025*
- 24 *Jumlah Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)*
- 25 *Jumlah Alokasi Anggaran pada Pelayanan Posbakum 2025*

- 26 *SDM Pengadilan Negeri Simalungun Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang*
- 27 *Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat*
- 28 *Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan*
- 29 *Keadaan Mutasi Masuk Tahun 2025*
- 30 *Keadaan Mutasi Keluar Tahun 2025*
- 31 *Rekapitulasi Mutasi Tahun 2025*
- 32 *Rekapitulasi Promosi Tahun 2025*
- 33 *Rekapitulasi Pensiun Tahun 2025*
- 34 *Daftar Nama Aparatur Yang Pensiun Tahun 2025*
- 35 *Rekapitulasi Diklat SDM Tahun 2025*
- 36 *Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat Tahun 2025*
- 37 *Pelaksanaan Revisi DIPA 400370 Tahun 2025*
- 38 *Realisasi Anggaran DIPA 400370 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025*
- 39 *Pelaksanaan Revisi DIPA 400371 Tahun 2025*
- 40 *Realisasi Anggaran DIPA 400371 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025*
- 41 *Keadaan Kendaraan Dinas TA. 2025*
- 42 *Keadaan Rumah Dinas TA. 2025*
- 43 *Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas TA. 2025*
- 44 *Keadaan Server 2025*
- 45 *Keadaan Perkara E-court dan E-Litigasi Tahun 2025*
- 46 *Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konvensi, Mutu Pelayanan, Kinerja Unit Pelayanan.*
- 47 *Rata-rata Scor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Desember 2025*
- 48 *Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun*
- 49 *Keadaan Pelayanan PTSP Tahun 2025*
- 50 *Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat*
- 51 *Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025*



DAFTAR GAMBAR

- 1 *Misi Pengadilan Negeri Simalungun*
- 2 *Motto Pengadilan Negeri Simalungun*
- 3 *Pelaksanaan Sidang Lapangan*
- 4 *Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun*
- 5 *Peta Jabatan*
- 6 *Penerimaan PNBPN 2025*
- 7 *Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar*
- 8 *Peta E-Court Seluruh Indonesia dan Tampilan E-Court*
- 9 *Tampilan SIPP dan MIS Pengadilan Negeri Simalungun*
- 10 *Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Simalungun*
- 11 *Tampilan Aplikasi Survei SiSUPER*
- 12 *Penilaian PTSP dan KIP*
- 13 *Deskripsi Inovasi E-Pelita*
- 14 *Deskripsi Inovasi E-Pesona*
- 15 *Deskripsi Inovasi Brodi*
- 16 *Deskripsi Inovasi Pangsid*
- 17 *Deskripsi Inovasi E-Checklist*
- 18 *Deskripsi Inovasi E3P*
- 19 *Deskripsi Inovasi Audio Gratifikasi*
- 20 *Duta E-Court Pengadilan Negeri Simalungun*
- 21 *Kegiatan Senam*
- 22 *Kegiatan Donor Darah*
- 23 *Kegiatan Pemeriksaan Darah*

The background image shows the entrance of a building with a portico supported by white columns. A tall flagpole stands in the center, flying the Indonesian flag. The entrance has a set of stairs and a dark door. There are potted plants on either side of the stairs. A banner is visible above the door with text in Indonesian. The text 'BAB I' and 'PENDAHULUAN' is overlaid in large white letters.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Kebijakan Umum Peradilan



Saat ini lembaga peradilan dituntut untuk lebih profesional dan transparan dalam penyelesaian perkara untuk menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga yang melindungi dan mengayomi bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena ini Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas pokok yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas untuk melaksanakan tugas non kedinasan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Untuk itu Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Simalungun harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada, baik itu personil maupun keadaan administrasi serta kondisi gedung dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih bersih, rapi teratur dan tertib.

Perumusan suatu kebijakan umum sangat memerlukan pedoman yang jelas agar setiap kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Simalungun dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Simalungun selalu mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk diantaranya Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035.

Beberapa upaya yang telah diuraikan pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Dukungan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang berkompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Dukungan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu;

Selain berpedoman kepada hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B juga berpedoman pada kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat program prioritas. Beberapa program prioritas tersebut, yaitu :

1. Program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Program tunggakan minutes nihil untuk melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara;
3. Program sistem pelayanan satu pintu (one stop integrated service) atau dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan persidangan. Dimana semua pelayanan persidangan dikelola secara satu pintu yakni bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Program keterbukaan informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang informatif dan akurat pada *website* Pengadilan Negeri

Simalungun Kelas I B “www.pn-simalungun.go.id” serta menggalakkan dan membantu pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pelaksanaan upload putusan ke Direktori Putusan;

5. Program pengembangan sistem pengadilan yang akuntabel dan transparan dengan mengoptimalkan meja pelayanan terpadu serta memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan di sekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B;
6. Program Standarisasi Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pengadilan Negeri;
7. Pelaksanaan penyelesaian perkara secara mediasi;
8. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui keikutsertaan pada kegiatan pelatihan dan atau bimbingan teknis;

Pada tahun 2025, sudah secara aktif menggunakan aplikasi *e-Court* untuk perkara perdata dan Aplikasi e-Berpadu untuk perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Simalungun menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Sampai saat ini Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lama 5 bulan. Dan untuk mendukung tercapainya penanganan perkara di Pengadilan Negeri Simalungun terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan, antara lain :

1. Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Court Calender;
2. Meningkatkan kepatuhan dalam pengisian data pada SIPP;
3. Melaksanakan administrasi perkara secara elektronik melalui e-Court dan e-Litigasi;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui meja PTSP dengan melaksanakan Pembinaan PTSP setiap pagi pada hari kerja;

Pengadilan Negeri Simalungun juga aktif dalam melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terhadap aspek-aspek yang mendukung kinerja dan pelayanan secara maksimal. Serta secara rutin melaksanakan pengawasan

yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Sasaran akhir dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik - baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan yaitu:

1. Memberi pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada para pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat.



B. VISI DAN MISI



B.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Simalungun, adalah

**Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun
Yang Agung**

Visi dimaksud bermakna untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

B.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu

Gambar 1. Misi Pengadilan Negeri Simalungun



C. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

Untuk mewujudkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Seluruh Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penyelesaian Perkara dengan Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
4. Keterbukaan Informasi kepada para Pencari Keadilan.



D. BUDAYA KERJA



Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, dimana segenap aparatur peradilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh dan taat kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas Institusi Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bersifat terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan;
15. Tidak menyimpang dan menyalahi prosedur yang berlaku.

Berdasarkan itu juga Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan 8 (delapan) Budaya Malu dalam bekerja. Adapun budaya malu tersebut adalah :

Malu terlambat masuk kantor dan pulang sebelum waktunya serta tidak mengikuti apel;

1. Malu tidak masuk kerja tanpa alasan atau keluar pada saat jam kerja;
2. Malu kerja tanpa terprogram, tidak bertanggungjawab dan terbengkalai;
3. Malu bekerja tidak berprestasi;
4. Malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor;
5. Malu tidak berpakaian rapi, tidak bertatakrama dan tidak berpakaian sopan santun;
6. Malu bermain, merokok dan membuat keributan pada saat jam kerja;
7. Malu tidak menjunjung tinggi, tidak menghargai dan tidak menjaga kehormatan korps.



E. MOTTO



Motto Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah “BERAKSI” yang merupakan akronim dari “Bersih Elegan Ramah Amanah Kreatif Solutif dan Inovatif”.

Gambar 2. Motto Pengadilan Negeri Simalungun





F. Rencana Strategis (RENSTRA)



Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

F.1 Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Simalungun perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat atas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun guna tercapai visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
5. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Simalungun yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Simalungun;
7. Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis Pengadilan Negeri Simalungun maka dapat secara tepat mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

F.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas penyederhanaan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap peradilan (access to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
7. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
8. Meningkatnya pengelolaan manajerial Pengadilan Negeri Simalungun secara akuntabel, efektif dan efisien.



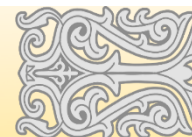
BAB II

KEADAAN

PERKARA



A. KEADAAN PERKARA



A.1 Keadaan Perkara Di Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Simalungun adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dalam kategori Pengadilan dengan 501 – 1000 Perkara peratahunnya. Data perkara tersebut dapat digambarkan dalam tabel – tabel berikut:

A.1.1 Kepaniteraan Perdata

Data keadaan perkara pada kepaniteraan perdata di Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Keadaan Perkara Perdata

Tabel 1. Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa 2025
1	Perdata Gugatan	77	184	261	24	205	52
2	Perdata Permohonan	12	260	272	41	264	7
3	Gugatan Sederhana	2	10	12	1	10	2
4	Perlawanan/Derden Verzet	6	4	10	0	9	1
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	-	6	6	-	6	0
7	Eksekusi	29	19	48	8	18	22

Statistik Implementasi E-Court Pengadilan Negeri Simalungun

Tabel 2. Implementasi E-Court Tahun 2025

No.	Pengadilan	Jumlah Terdaftar	SKUM (Rp)	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total
1	Pengadilan Negeri Simalungun	458	Rp 459.417.000	184	260	4	10	458
	Jumlah	458	Rp 459.417.000	184	260	4	10	458

A.1.2 Kepaniteraan Pidana

Data keadaan perkara pada kepaniteraan pidana di Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa 2025
1	Pidana Biasa	49	509	558	0	485	73
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	3	3	0	3	0
4	Lalu Lintas	0	2452	2452	0	245	0
5	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
6	Pidana Anak	0	15	15	0	15	0
7	Pidana Praperadilan	0	5	5	0	4	1

A.2 Keadaan Perkara Tingkat Banding

Upaya Hukum banding yaitu pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan perkara di tingkat pertama. Adapun data perkara Pengadilan Negeri Simalungun yang mengajukan Upaya Hukum banding adalah sebagai berikut:

A.2.1 Kepaniteraan Perdata

Data keadaan perkara Upaya Hukum Banding pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa 2025
1	Perdata Gugatan	8	52	60	1	43	9
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/ Derden Verzet	0	10	10	0	6	2
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

A.2.2 Kepaniteraan Pidana

Data keadaan perkara Upaya Hukum Banding pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa 2025
1	Pidana Biasa	35	131	166	0	141	25
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0

4	Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
6	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Peradilan	0	0	0	0	0	0

A.3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Upaya Hukum Kasasi yaitu Upaya Hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir. Adapun data perkara Pengadilan Negeri Simalungun yang mengajukan Upaya Hukum kasasi adalah sebagai berikut:

A.3.1 Kepaniteraan Perdata

Data keadaan perkara Upaya Hukum Kasasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa 2025
1	Perdata Gugatan	10	24	34	1	9	14
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	1	7	8	0	3	5
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

A.3.2 Kepaniteraan Pidana

Data keadaan perkara Upaya Hukum Kasasi pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa 2025
1	Pidana Biasa	37	120	157	0	106	51
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
4	Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
6	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0

A.4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum yang diajukan ketika tidak puas dengan putusan kasasi, dimana Putusan kasasi adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Adapun data perkara Pengadilan Negeri Simalungun yang mengajukan Upaya Hukum PK adalah sebagai berikut:

A.4.1 Kepaniteraan Perdata

Data keadaan perkara Upaya Hukum PK pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Keadaan Perkara Perdata PK Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa 2025
1	Perdata Gugatan	3	4	7	0	5	2
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/ Deden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

A.4.2 Kepaniteraan Pidana

Data keadaan perkara Upaya Hukum PK pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Keadaan Perkara Pidana PK Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa 2025
1	Pidana Biasa	2	4	6	0	4	2
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
4	Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
6	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Peradilan	0	0	0	0	0	0



B. PENYELESAIAN PERKARA



B.1 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diputus tepat waktu menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2014 adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Simalungun sebagai berikut :

B.1.1 Perkara Perdata

Perkara yang diputus tepat waktu di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2025	Jumlah Beban Perkara Tahun 2025	Perkara Yang Diputus Tahun 2025	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Perdata Gugatan	77	184	261	205	142	63
2	Perdata Permohonan	12	260	260	264	264	0
3	Gugatan Sederhana	2	10	10	10	10	0
4	Perlawanan/ Derden Verzet	6	4	4	9	1	8
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
Jumlah		97	449	535	250	417	71

B.1.2 Perkara Pidana

Perkara yang diputus tepat waktu di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2025	Jumlah Beban Perkara Tahun 2025	Perkara Yang Diputus Tahun 2025	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Pidana Biasa	49	509	558	485	485	0
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	3	3	3	3	0
4	Lalu Lintas	0	2452	2452	2452	2452	0
5	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
6	Pidana Anak	0	15	15	15	15	0
7	Pidana Peradilan	0	5	5	4	4	0
Jumlah		49	2984	3033	2959	2959	0

B.2 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.

Berikut adalah jumlah perkara Pengadilan Negeri Simalungun yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada tahun 2025 :

B.2.1 Upaya Hukum Banding

B.2.1.1 Perkara Perdata :

Tabel 12. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2024 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2025 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Perdata Gugatan	77	205	52	153
2	Perdata Permohonan	12	264	0	264
3	Gugatan Sederhana	2	10	0	10
4	Perlawanan/ Deden Verzet	6	9	10	0
5	PHI	0	0	0	0
Jumlah		97	488	62	427

B.2.1.2 Perkara Pidana:

Tabel 13. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2024 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2025 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Pidana Biasa	44	485	131	354
2	Pidana Singkat	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0
4	Lalu Lintas	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0
6	Pidana Anak	0	0	0	0
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
Jumlah		44	485	131	354

B.2.2 Upaya Hukum Kasasi

B.2.2.1 Perkara Perdata :

Tabel 14. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2024 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2025	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Perdata Gugatan	8	43	31	12
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0
	Jumlah	8	43	31	12

B.2.2.2 Perkara Pidana:

Tabel 15. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2024 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2025	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Pidana Biasa	124	106	183	47
2	Pidana Singkat	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0
4	Lalu Lintas	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0
6	Pidana Anak	0	0	0	0
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
	Jumlah	124	106	183	47

B.2.3 Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

a. Perkara Perdata :

Tabel 16. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Jenis Perkara	Putusan Tk. I Tahun 2025 Yang Telah BHT	Putusan Banding Tahun 2025 Yang Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2025	Permohonan PK Tahun 2025	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2025
1	Perdata Gugatan	153	12	9	4	5
2	Perdata Permohonan	264	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	10	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	9	0	3	0	3
5	PHI	0	0	0	0	0
	Jumlah	426	12	12	4	8

b. Perkara Pidana :

Tabel 17. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Jenis Perkara	Putusan Tk. I Tahun 2025 Yang Telah BHT	Putusan Banding Tahun 2025 Yang Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2025	Permohonan PK Tahun 2025	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2025
1	Pidana Biasa	485	141	106	4	102
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
4	Lalu Lintas	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0
6	Pidana Anak	0	0	0	0	0
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0
Jumlah		485	141	106	4	102

B.3 Perkara Yang berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif didefinisikan dalam Perma 1 Tahun 2024 sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Berikut jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restorative Justice (RJ) di Pengadilan Negeri Simalungun

Tabel 18. Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restorative Justice (RJ)

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diajukan Secara RJ Tahun 2025	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kreteria Penerapan RJ Tahun 2025	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Secara RJ Tahun 2025
1	Pidana Biasa	4	4	4
2	Pidana Singkat	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0
4	Lalu Lintas	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0
6	Pidana Anak	0	0	0
7	Pidana Praperadilan	0	0	0
Total		4	4	4

B.4 Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya

proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Adapun data perkara mediasi di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2024	Status				
			Berhasil	Berhasil sebagian	Tidak Berhasil	Proses Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	87	4	0	79	4	0
	Jumlah	87	4	0	79	4	0

B.5 Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Menurut Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Diversi adalah adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Simalungun yang berhasil melalui diversi pada tahun 2025 :

Tabel 20. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Pidana Anak 2025	Jumlah Perkara Diversi 2025	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	15	1	1	0	0
	Jumlah	15	1	1	0	0

B.6 Perkara Perdata Yang Menggunakan E-Court

Ecourt Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Berikut Jumlah Perkara pada e-Court Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 :

Tabel 21. Jumlah Perkara Perdata yang didaftarkan Melalui e-Court

No.	Pengadilan	Jumlah Teraftar	SKUM (Rp)	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total
1	Pengadilan Negeri Simalungun	458	Rp 459.417.000	184	260	4	10	458
	Jumlah	458	Rp 459.417.000	184	260	4	10	458

Tabel 22. Keadaan Perkara Perdata yang didaftarkan melalui ecourt

No.	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Ecourt	E-Litigasi
1	Gugatan	184	184	184
2	Permohonan	260	260	260
3	Gugatan Sederhana	10	10	10
4	Bantahan	4	4	4
	Total	458	458	458

B.7 Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Berikut perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025 :

Tabel 23. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Dilimpahkan
1	Pidana Biasa	509
2	Pidana Singkat	0
3	Pidana Anak	0
4	Praperadilan	0

B.8 Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Berikut layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025:

Tabel 24. Jumlah Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

No.	Layanan	Layanan Perkara Pidana 2025	
		E Berpadu	Konvensional
1	Pengeledahan	50	0
2	Penyitaan	451	0
3	Perpanjangan Penahanan	544	0

4	Pelimpahan Berkas	509	0
5	Izin Besuk Tahanan	762	0
6	Izin Keluar Tahanan	0	0
7	Pinjam Pakai Barang Bukti	0	0
8	Pengadilan Penahanan	0	0
9	Penangguhan Penahanan	0	0
10	Pendaftaran Praperadilan	0	5
11	Diversi	10	0
12	Banding	0	47
13	Pembantaran Penahanan	0	0

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan Prioritas Nasional merupakan Pos Bantuan Hukum, Sidang Di Luar Gedung Pengadilan, dan Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo disatuan kerja tingkat pertama. Berikut data Program Prioritas Nasional pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 :

C.1 Posbakum (Satker Yang Mendapatkan Alokasi Dan Realisasi Anggaran)

Tabel 25. Jumlah Alokasi Anggaran pada Pelayanan Posbakum Tahun 2025

No.	Nama Pengadilan	Organisasi Yang Memberi Pelayanan	Jumlah			
			Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	LBH – AP PDM Simalungun	284	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	-

Jenis layanan yang diberikan oleh POSBAKUM adalah :

- Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma;

C.2 Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

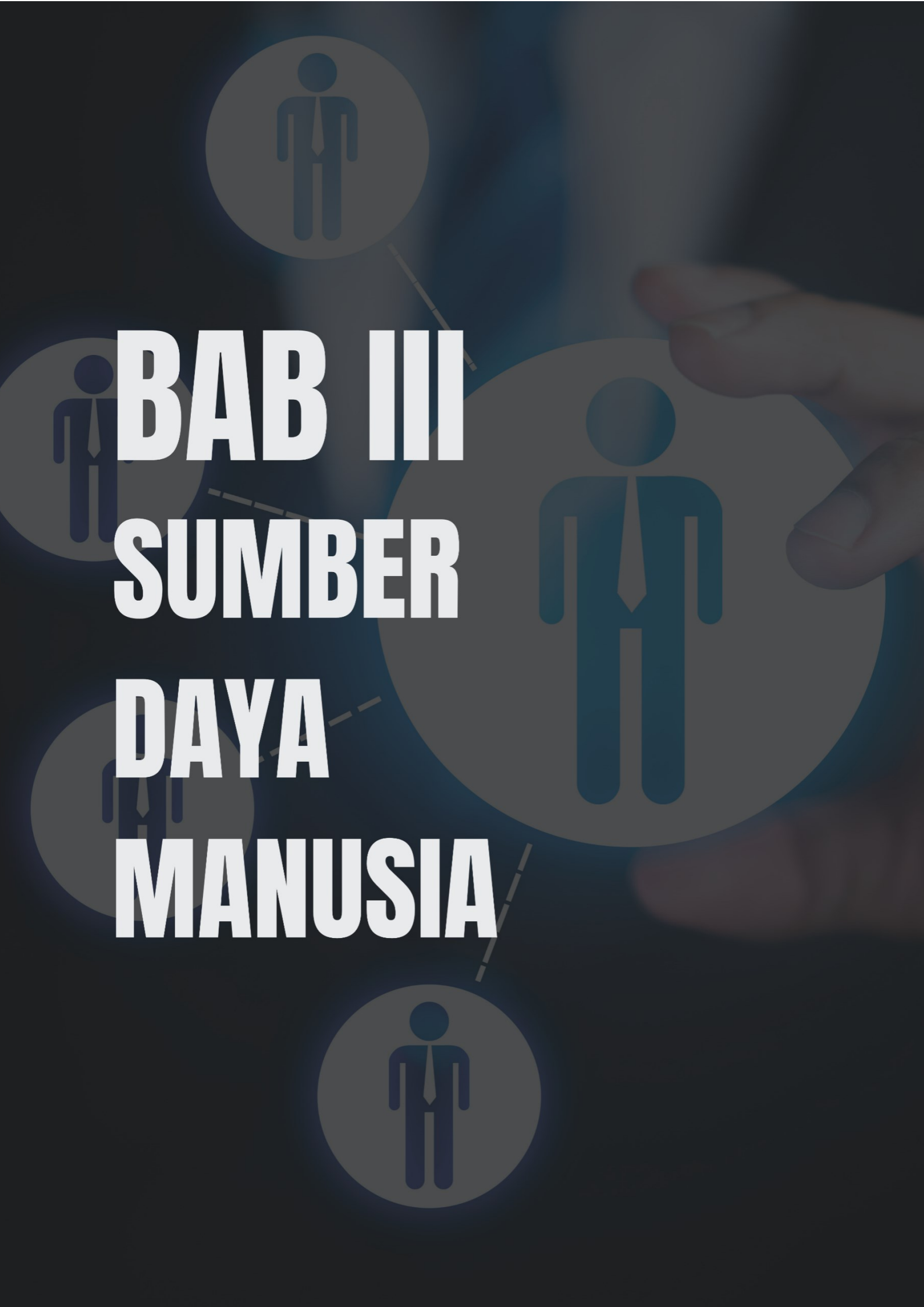
Pada dasarnya tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun tidak ada anggaran khusus untuk melaksanakan Sidang Keliling. Namun Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan sebagai bentuk pelayanan prima oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2025 yaitu pada 21 Maret 2025 dan 31 Oktober 2025. Selain daripada itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga sudah mengajukan permintaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk sidang di luar gedung pengadilan pada bulan Februari tahun 2025.

Gambar 3 : Pelaksanaan Sidang Lapangan



C.3 Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pelaksanaan persidangan untuk perkara prodeo di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2025 nihil karena tidak pengajuan pembebasan biaya perkara sepanjang tahun 2025. Selain daripada itu tidak tersedia anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2025. Namun sudah diajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada bulan Agustus tahun 2025.

The background features a dark blue gradient with several light blue circular icons, each containing a stylized human figure in a suit. A hand is visible on the right side, interacting with one of the icons. Dashed lines connect some of the icons, suggesting a network or flow.

BAB III

SUMBER

DAYA

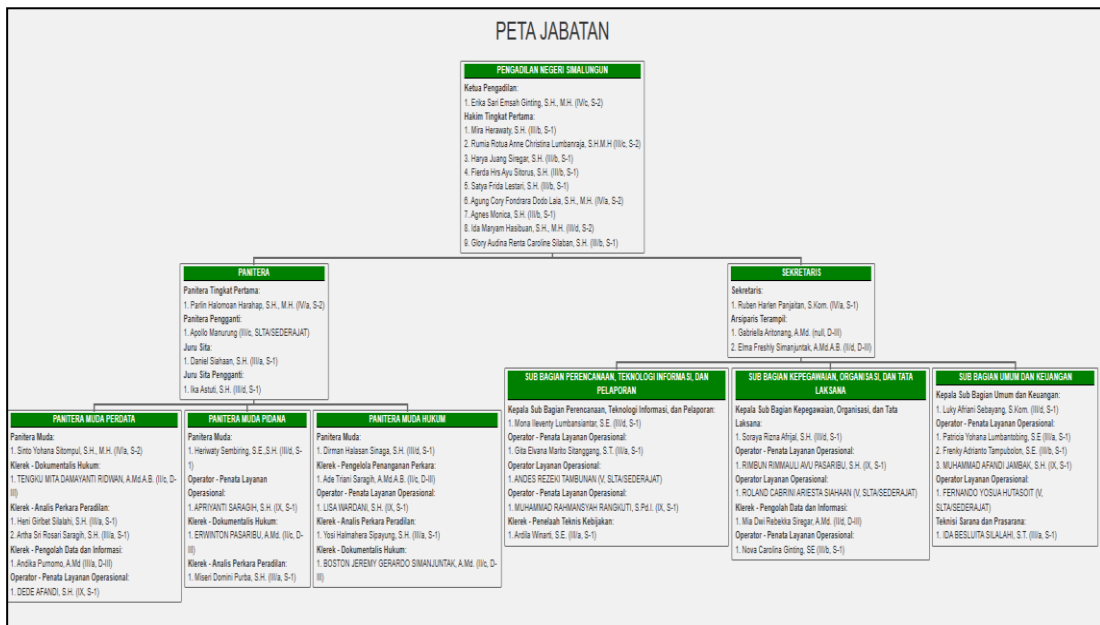
MANUSIA



Gambar 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun



Gambar 5. Peta Jabatan



1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Ada pada Pengadilan Negeri Simalungun.

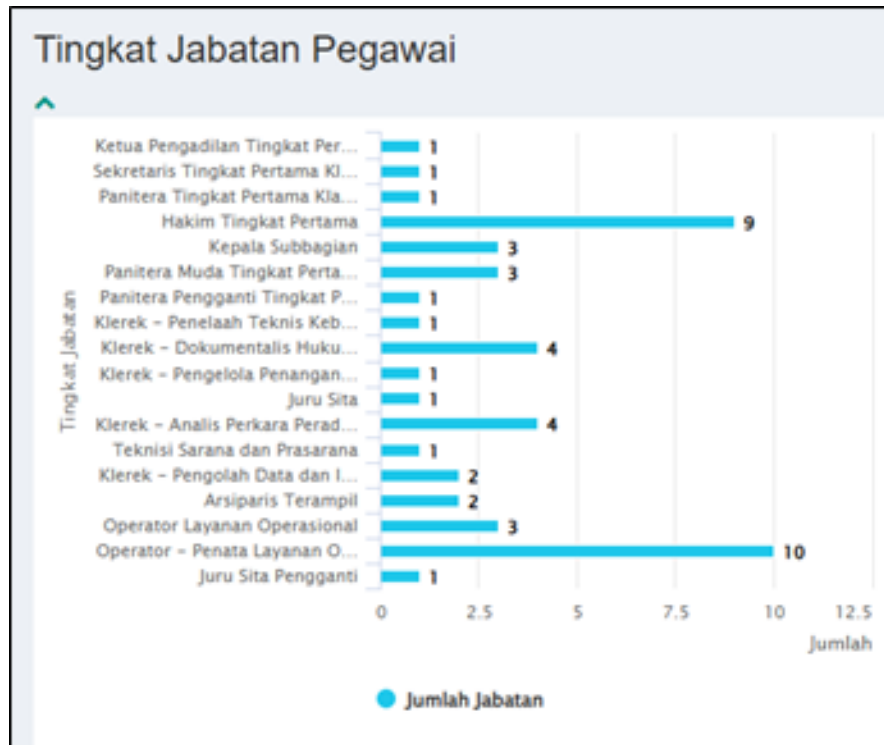
Tabel 26. SDM Pengadilan Negeri Simalungun Berdasarkan Pangkat/ Gol Ruang

NO.	NAMA	Jabatan	Pangkat
1	ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH., M.H.	Ketua	IV/b
2	IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.,M.H.	Hakim	III/d
3	AGUNG CORY F.D. LAIA, S.H.,M.H.	Hakim	III/d
4	RUMIA ROTUA A.C LUMBANRAJA, S.H., M.H.	Hakim	III/c
5	AGNES MONICA, S.H.	Hakim	III/b
6	GLORY AUDINA R.C SILABAN, S.H.	Hakim	III/b
7	HARYA JUANG SIREGAR, S.H.	Hakim	III/b
8	MIRA HERAWATY, S.H.	Hakim	III/b
9	SATYA FRIDA LESTARI, S.H.	Hakim	III/b
10	FIERDA HRS AYU SITORUS, S.H.	Hakim	III/b
11	PARLIN HALOMOAN HARAHAP, S.H., M.H.	Panitera	IV/a
12	RUBEN HARLEN PANJAITAN, S.Kom	Sekretaris	III/d
13	HERIWATY SEMBIRING, S.E,S.H	Panitera Muda Pidana	III/d
14	SINTO YOHANA SITOMPUL, S.H.	Panitera Muda Perdata	III/d
15	DIRMAN HALASAN SINAGA, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/d
16	SORAYA RIZNA AFRIJAL, S.H.	Kasub Bag Keportala	III/d

17	MONA ILEVENTY LUMBANSIANTAR, S.E.	Kasub Bag.Perencanaan TI dan Pelaporan	III/d
18	LUKY AFRIANI SEBAYANG, S.Kom	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	III/d
19	APOLLO MANURUNG	Panitera Pengganti	III/c
20	DANIEL SIAHAAN	Jurusita	III/a
21	IKA ASTUTI, S.H.	Jurusita Pengganti	III/c
22	NOVA CAROLINA GINTING, S.E.	Operator-Penata Layanan Operasional	III/b
23	FRENKY ADRIANTO T, S.E	Operator-Penata Layanan Operasional	III/b
24	ARDILA WINARTI, S.E	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	III/a
25	ANDIKA PURNOMO, A.MD	Klerek-Pengolah Data dan Informasi	III/a
26	MISERI DOMINI PURBA, S.H.	Klerek- Analis Perkara Peradilan	III/a
27	HENI GIRLBET SILALAH, S.H.	Klerek- Analis Perkara Peradilan	III/a
28	ARTHA SRI ROSARI SARAGIH, S.H.	Klerek- Analis Perkara Peradilan	III/a
29	GITA ELVANA MARITO SITANGGANG, S.T	Operator-Penata Layanan Operasional	III/a
30	PATRICIA YOHANA LUMBANTOBING, S.E	Operator-Penata Layanan Operasional	III/a
31	IDA BESLUITA SILALAH, S.T.	Operator-Teknisi Sarana dan Prasarana (CPNS)	III/a
32	YOSI HALMAHERA SIPAYUNG, S.H.	Klerek- Analis Perkara Peradilan	III/a
33	MIA DWI REBEKKA SIREGAR, A.Md	Operator-Pengolah Data dan Informasi	II/d
34	ELMA FRESHLY SIMANJUNTAK, A.Md.A.B.	Arsiparis	II/d

35	ADE TRIANI SARAGIH, A.Md.A.B	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	II/c
36	AHMAD TAUFIQ HARAHAHAP, A.Md	Klerek- Dokumentalis Hukum	II/c
37	BOSTON JEREMY GERARDO SIMANJUNTAK, A.Md	Klerek- Dokumentalis Hukum	II/c
38	ERWINTON PASARIBU, A.Md	Klerek- Dokumentalis Hukum	II/c
39	TENGKU MITA DAMAYANTI RIDWAN, A.Md	Klerek- Dokumentalis Hukum	II/c
40	GABRIELLA ARITONANG, A.Md	Arsiparis	VII
41	APRIYANTI SARAGIH, S.H.	Operator-Penata Layanan Operasional	IX
42	DEDE AFANDI, S.H.	Operator-Penata Layanan Operasional	IX
43	RIMBUN RIMMAULI AVU PASARIBU, S.H.	Operator-Penata Layanan Operasional	IX
44	LISA WARDANI, S.H.	Operator-Penata Layanan Operasional	IX
45	MUHAMMAD RAHMANSYAH RANGKUTI S.Pd.I	Operator-Penata Layanan Operasional	IX
46	MUHAMMAD AFFANDI JAMBAK, S.H.	Operator-Penata Layanan Operasional	IX
47	ROLAND CABRINI ARIESTA SIAHAAN	Operator Layanan Operasional	V
48	FERNANDO Y HUTASOIT	Operator Layanan Operasional	V
49	ANDES REZEKI TAMBUNAN	Operator Layanan Operasional	V

No	Satuan Kerja	Hakim			Teknis					Non Teknis			Jlh
		Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Panitera	Panitera Muda	Panitera Pengganti	Jurusita	Jurusita Pengganti	Sekretaris	Kasub. Bag	Pelaksana	
1	PN Simalungun	1	0	10	1	3	1	1	1	1	3	28	49

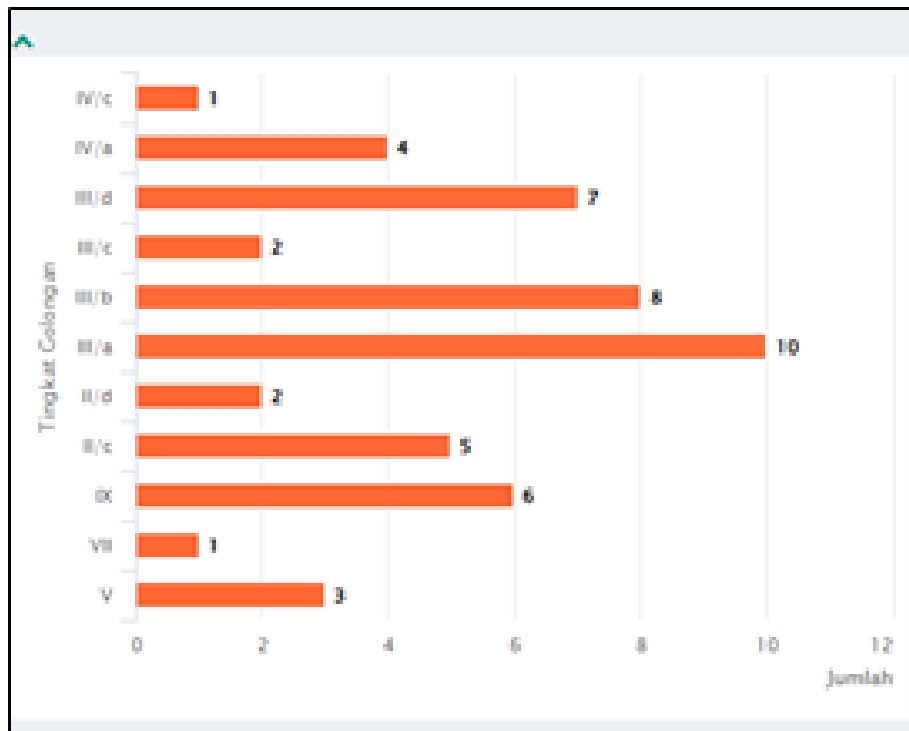


Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Pangkat / Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat

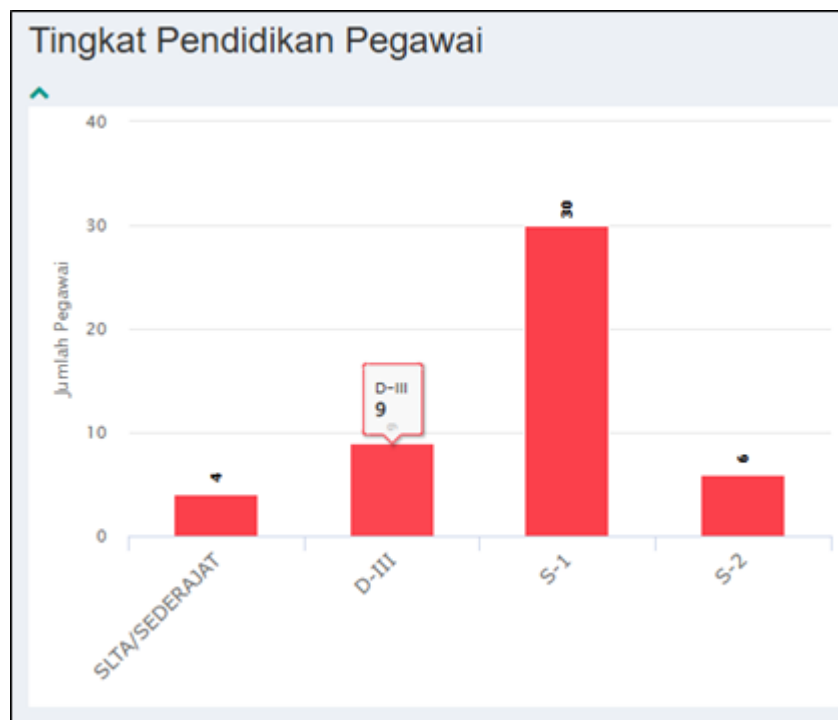
No	Jabatan	Pangkat											
		V	VII	IX	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	Ketua												1
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hakim							6	1	1	1		
4	Panitera										1		
5	Sekretaris									1			
6	Panitera Muda									2	1		
7	Kasub. Bag									3			
8	Panitera Pengganti							1					
9	Jurusita							1					
10	Jurusita Pengganti							1					
11	Pelaksana PNS				5	2	9	2					
12	Pelaksana P3K	3	1	6									
Jumlah		49 Orang											

Tabel . Dalam bentuk Statistik

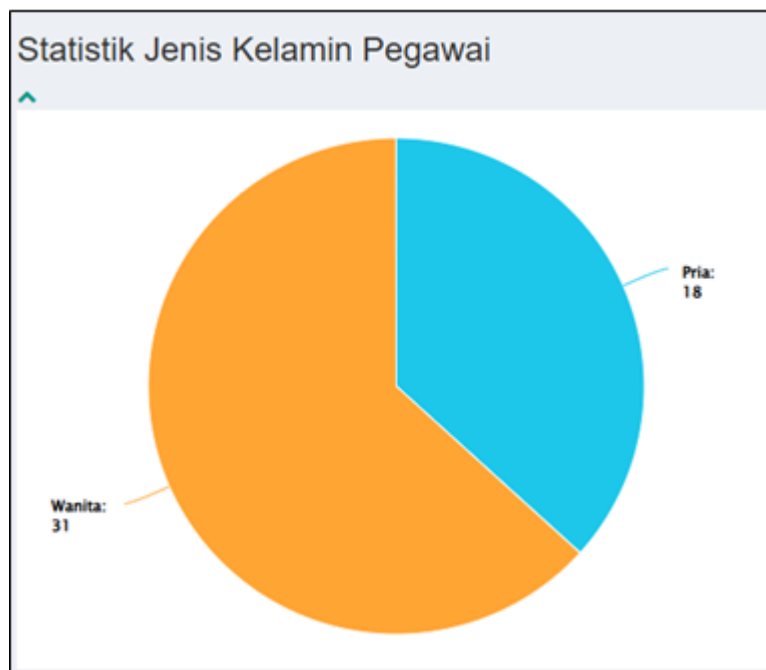


Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan



Kondisi Hakim dan ASN berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025, sebagai berikut:



A. Mutasi

Mutasi pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Pada tahun 2025 Hakim dan Pegawai yang mutasi adalah sebagai berikut :

A.1 Mutasi Masuk

Tabel 29. Keadaan Mutasi Masuk Tahun 2025

No	Nama/ NIP	Gol/ Ruang	Jabatan/Unit Kerja	
			Lama	Baru
1	RUMIA ROTUA A.C LUMBANRAJA, S.H., M.H.	III/c	Hakim PN Sidikalang Kelas II	Hakim PN Simalungun Kelas I B
2	AGNES MONICA, S.H.	III/b	Hakim PN Mukomuko Kelas II	Hakim PN Simalungun Kelas I B
3	GLORY AUDINA R.C SILABAN, S.H.	III/d	Hakim PN Tarutung Kelas II	Hakim PN Simalungun Kelas I B
4	HARYA JUANG SIREGAR, S.H.	II/d	Hakim PN Saumlaki Kelas II	Hakim PN Simalungun Kelas I B
5	MIRA HERAWATY, S.H.	III/a	Hakim PN Ende Kelas II	Hakim PN Simalungun Kelas I B
6	SATYA FRIDA LESTARI, S.H.	III/a	Hakim PN Sungai Penuh Kelas II	Hakim PN Simalungun Kelas I B
7	FIERDA HRS AYU SITORUS, S.H.	III/a	Hakim PN Seirampah Kelas II	Hakim PN Simalungun Kelas I B

8	GITA ELVANA MARITO SITANGGANG, S.T.	III/a	Operator - Penata Layanan Operasional PN Mukomuko	Operator - Penata Layanan Operasional PN Simalungun
9	IDA BESLUITA SILALAH, S.T.	III/a	-	CPNS-Teknisi Sarana dan Prasarana
10	TENGGU MITA DAMAYANTI RIDWAN, A.Md.A.B.	II/c	-	CPNS-Dokumentalis Hukum
11	BOSTON JEREMY GERARDO SIMANJUNTAK, A.Md.	II/c	-	CPNS-Dokumentalis Hukum
12	ERWINTON PASARIBU, A.Md.	II/c	-	CPNS-Dokumentalis Hukum
13	AHMAD TAUFIQ HARAHAP, A.Md.	II/c	-	CPNS-Dokumentalis Hukum
14	DEDE AFANDI, S.H.	IX	-	Operator-Penata Layanan Operasional
15	RIMBUN RIMMAULI AVU PASARIBU, S.H.	IX	-	Operator-Penata Layanan Operasional
16	LISA WARDANI, S.H.	IX	-	Operator-Penata Layanan Operasional
17	MUHAMMAD RAHMANSYAH RANGKUTI S.Pd.I	IX	-	Operator-Penata Layanan Operasional
18	MUHAMMAD AFFANDI JAMBAK, S.H.	IX	-	Operator-Penata Layanan Operasional
19	ROLAND CABRINI ARIESTA SIAHAAN	V	-	Operator Layanan Operasional
20	FERNANDO Y HUTASOIT	V	-	Operator Layanan Operasional
21	ANDES REZEKI TAMBUNAN	V	-	Operator Layanan Operasional

A.2 Mutasi Keluar

Tabel 30. Keadaan Mutasi Keluar Tahun 2025

No	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan/Unit Kerja	
			Lama	Baru
1	Surtiyono, S.H., M.H.	IV/b	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas I B
2	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.	IV/a	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun	Hakim Pengadilan Negeri Cibirong Kelas IA
3	Widi Astuti, S.H.	IV/a	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun	Hakim Pengadilan Negeri Lubukpakam Kelas IA
4	Sari Rahma Dewi, S.H.	III/b	Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Simalungun	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Rekapitulasi mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Rekapitulasi Mutasi Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Mutasi Masuk				Mutasi Keluar			
		Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah	Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1	PN Simalungun	7	-	14	21	3	-	1	4

B. Promosi

Rekapitulasi promosi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 32. Rekapitulasi Promosi Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Promosi Sebagai							Jlh
		Ketua	Wakil Ketua	Panitera	Sekretaris	Panmud	Kasubag	Panitera Pengganti	
	PN Simalungun	1	-	-	-	-	-	1	2

C. Pensiun

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Rekapitulasi Pensiun Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Sebab Pensiun			Jumlah
		Batas Usia	Meninggal	Pensiun Dini	
	PN Simalungun	1	-	-	1

Berikut daftar nama Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Simalungun yang pensiun Tahun 2025 :

Tabel 34. Daftar Nama Aparatur Yang Pensiun Tahun 2025

No	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan	TMT Pensiun
1	Fariani Saragih	III/b	Jurusita Pengganti	1 November 2025

D. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 35. Rekapitulasi Diklat SDM Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Jenis Diklat					
		Diklat PKA	Diklat PKP	Diklat Teknis	Diklat Fungsional	Diklat Manajemen	Latsar CPNS
1	PN Simalungun	-	-	7	1	18	5

Berikut daftar nama Hakim dan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 :

Tabel 36. Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat Tahun 2025

No	Nama	Nama Diklat	Penyelenggara
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan
		Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Tingkat Lanjutan Angkatan II Tahun 2024	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 1	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara wilayah Sumatera Utara;	Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Sosialisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

2	Agung C.F D Laia, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan
		Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial 4 Lingkungan Peradilan secara zoom	Biro Humas Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 2	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 2	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4	Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.	Workshop Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan Angkatan III Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 3	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
5	Harya Juang Siregar, S.H.	Workshop Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan Angkatan III Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi	Kepala Pusdiklat Teknis

		dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 3	Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
6	Agnes Monica, S.H	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 2	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
7	Glory Audina R. C Silaban, S.H	Workshop Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan Angkatan III Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 3	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8	Parlin H Harahap, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis dan Administrasi Yudisial	Mahkamah Agung RI
9	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan
		Pelaksanaan Uji Subtansi bagi Panitera Muda	Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
10	Sinto Y Sitompul, S.H., M.H.	Pelaksanaan Uji Subtansi bagi Panitera Muda	Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
11	Dirman H Sinaga, S.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan
		Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial 4	Biro Humas Mahkamah Agung RI

		Lingkungan Peradilan secara zoom	
		Pelaksanaan Uji Subtansi bagi Panitera Muda	Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
12	Apollo Manurung	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan
13	Daniel Siahaan	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Teknis Jurusita	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
14	Heni Grlbet Silalahi, S.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan
15	Artha S Rosari Saragih, S.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan

Berikut daftar nama Hakim dan Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025:

No	Nama	Nama Bimbingan Teknis	Penyelenggara
1	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sosialisasi Peraturan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Review dan Sosialisasi Anti Korupsi/Antigratifikasi	KPPN Pematangsiantar
2	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Pelatihan Capacity Building Keprotokolan Tahun 2025	Bank Indonesia Pematangsiantar

		Pelatihan Manajemen Sosial Kultural	E-Learning Kemenkeu
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Kepegawaian	Sekretaris Mahkamah Agung
3	Luky Afriani Sebayang, S.Kom	Sosialisasi Peraturan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Review dan Sosialisasi Anti Korupsi/Antigratifikasi	KPPN Pematangsiantar
4	Mona Lumbansiantar, S.E	Pelatihan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	BLDK Kemenkeu RI
		Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial 4 Lingkungan Peradilan secara zoom	Biro Humas Mahkamah Agung RI
5	Nova C Ginting, S.E	Penilaian Potensi PNS pada Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Kepegawaian	Sekretaris Mahkamah Agung
6	Frenky Adrianto T, S.E.	Penilaian Potensi PNS pada Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI
		Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan, Sosialisasi Kebijakan Perbendaharaan triwulan IV Tahun 2025	KPPN Pematangsiantar
7	Yosi H Sipayung, S.H.	Penilaian Potensi PNS pada Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI
8	Gita E M. Sitanggang, S.T	Penilaian Potensi PNS pada Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI
9	Mia Dwi Rebekka Siregar, A.Md	Penilaian Potensi PNS pada Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Kepegawaian	Sekretaris Mahkamah Agung
10	Ardila Winarti, S.E.	Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial 4 Lingkungan Peradilan secara zoom	Biro Humas Mahkamah Agung RI
11	Patricia Y Lumbantobing, S.E.	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan, Sosialisasi Kebijakan Perbendaharaan triwulan IV Tahun 2025	KPPN Pematangsiantar
12	M. Rahmansyah Rangkuti, S.Pd.I	Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial 4 Lingkungan Peradilan secara zoom	Biro Humas Mahkamah Agung RI

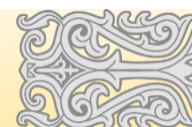
13	Ida Besluta Silalahi, S.T	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Gelombang III Tahun 2025.	Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI
14	Ahmad Taufiq Harahap, A.Md	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI kerjasama dengan PPSPDM KEBTKE
15	Erwinton Pasaribu, A.Md	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI kerjasama dengan PPSPDM KEBTKE
16	Boston G J Simanjuntak, A.Md	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI kerjasama dengan PPSPDM KEBTKE
17	Tengku Mita Damayanti Ridwan, A.Md	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI kerjasama dengan PPSPDM KEBTKE
18	Gabriella Aritonang, A.Md.	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Kepegawaian	Sekretaris Mahkamah Agung
19	Apriyanti Saragih, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
20	Dede Afandi, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
21	Lisa Wardani, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
22	Muhammad Afandi Jambak, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
23	M.Rahmansyah Rangkuti.S.Pd.I	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI

24	Rimbun R.A Avu Pasaribu, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
25	Andes Rezeki Tambunan	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
26	Fernando Y Hutasoit	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
27	Roland C Ariesta Siahaan	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI

BAB IV
PENGELOLAAN
KEUANGAN,
SARANA DAN
PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI
INFORMASI



A. PENGELOLAAN KEUANGAN



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB sebagai satuan kerja tingkat pertama mempunyai 2 DIPA yaitu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 01 dan DIPA 03 Badan Peradilan Umum 03 dengan keterangan sebagai berikut:

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi kode satker 400370 dengan Nomor SP DIPA- 005.01.2.400370/2025 tanggal 2 Desember 2025 dengan total pagu awal sebesar Rp. 6.486.940.000,- (enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak mengalami perubahan pada DIPA 01, selama tahun 2025 melakukan revisi sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37. Pelaksanaan Revisi DIPA 400370 Tahun 2025

No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	2 Desember 2025	Rp 6.486.940.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	8 Januari 2025	Rp 6.486.940.000	Pemutakhiran KPA
3	Revisi Ke- 2	7 Februari 2025	Rp 6.486.940.000	Pemutakhiran KPA
4	Revisi Ke- 3	23 Februari 2025	Rp 6.486.940.000	Revisi Penyesuaian Anggaran Mahkamah Agung RI TA 2025
5	Revisi Ke- 4	5 Maret 2025	Rp 6.486.940.000	Pemutakhiran KPA
6	Revisi Ke- 5	23 Maret 2025	Rp 6.486.940.000	Revisi Buka Blokir Mahkamah Agung RI TA 2025
7	Revisi Ke- 6	10 April 2025	Rp 6.486.940.000	Pemutakhiran KPA
8	Revisi Ke- 7	11 April 2025	Rp 6.486.940.000	Pemutakhiran KPA
9	Revisi Ke- 8	24 April 2025	Rp 6.486.940.000	Halaman III DIPA
10	Revisi Ke- 9	28 Mei 2025	Rp 6.773.416.000	Penambahan Pagu
11	Revisi ke -10	18 Juni 2025	Rp 6.773.416.000	Pemutakhiran KPA
12	Revisi Ke-11	10 Juli 2025	Rp 6.773.416.000	Halaman III DIPA
13	Revisi Ke-12	22 Juli 2025	Rp 6.899.016.000	Penambahan Pagu

14	Revisi Ke-13	28 juli 2025	Rp 6.899.016.000	Pemutakhiran KPA
15	Revisi Ke-14	20 Agustus 2025	Rp 6.899.016.000	Pemutakhiran KPA
16	Revisi Ke-15	10 September 2025	Rp 6.899.016.000	Pemutakhiran KPA
17	Revisi Ke-16	20 Oktober 2025	Rp 7.623.408.000	Hal III DIPA dan Revisi Antar Satker
18	Revisi Ke-17	24 Oktober 2025	Rp 7.586.448.000	Revisi Buka Blokir Mahkamah Agung RI TA 2025
19	Revisi Ke-18	28 Oktober 2025	Rp 7.586.448.000	Pemutakhiran KPA
20	Revisi Ke-19	14 November 2025	Rp 7.730.206.000	Penambahan Pagu
21	Revisi Ke-20	27 November 2025	Rp 7.730.206.000	Pemutakhiran KPA
22	Revisi Ke-21	9 Desember 2025	Rp 7.730.206.000	Pemutakhiran KPA

Dengan realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2025 sebesar 7.614.340.946,- atau 98,50% dari jumlah pagu sebesar Rp 7.730.206.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 38. Realisasi Anggaran DIPA 400370 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detail	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	7.730.206.000	7.614.340.946	98,50 %	115.865.054	1,5%
WA	Program Dukungan Manajemen	7.730.206.000	7.614.340.946	98,50 %	115.865.054	1,5%
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.375.935.000	1.306.630.005	94,96 %	69.304.995	5,04%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.375.935.000	1.306.630.005	94,96 %	69.304.995	5,04%
EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.225.935.000	1.156.765.575	94,36 %	69.169.425	5,04%
051	Pengadaan kendaraan bermotor	372.705.000	370.300.000	99,35 %	2.405.000	0,65%
051.0A	Pengadaan Kendaraan Dinas	372.705.000	370.300.000	99,35 %	2.405.000	0,65%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.705.000	370.300.000	99,35 %	2.405.000	0,65%
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	853.230.000	786.465.575	92,18 %	66.764.425	7,82%

053.0A	Fasilitas Perkantoran	853.230.000	786.465.575	92,18 %	66.764.425	7,82%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	853.230.000	786.465.575	92,18 %	66.764.425	7,82%
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	150.000.000	149.864.430	99,91 %	135.570	0,09%
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	150.000.000	149.864.430	99,91 %	135.570	0,09%
051.0A	Tambah Daya Listrik	150.000.000	149.864.430	99,91 %	135.570	0,09%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	150.000.000	149.864.430	99,91 %	135.570	0,09%
WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6.354.271.000	6.307.710.941	99,27 %	46.560.059	0,73%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.353.971.000	6.307.663.441	99,27 %	46.307.559	0,73%
EBA.962	Layanan Umum	700.000	700.000	100,00 %	0	0,00%
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000	700.000	100,00 %	0	0,00%
051.0A	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100,00 %	0	0,00%
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100,00 %	0	0,00%
6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	6,353,271,000	6,306,963,441	99.27 %	46,307,559	0,73%
001	Gaji dan Tunjangan	5,065,298,000	5,025,021,564	99.20 %	40,276,436	0,80%
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5,065,298,000	5,025,021,564	99.20 %	40,276,436	0,80%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.730.768.000	1.730.766.680	100,00 %	1.320	0,00%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000	28.805	96,02 %	1.195	%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	120.314.000	120.312.538	100,00 %	1.462	0,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33.253.000	33.251.663	100,00 %	1.337	0,00%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100,00 %	0	0,00%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	50.040.000	50.040.000	100,00 %	0	0,00%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7.983.000	7.922.118	99,24 %	60.882	0,76%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	89.584.000	89.583.540	100,00 %	460	0,00%
511129	Belanja Uang Makan PNS	336.197.000	302.531.000	89,99 %	33.666.000	10,01 %
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	37.240.000	37.240.000	100,00 %	0	0,00%

511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	298.519.000	298.507.396	100,00 %	11.604	0,00%
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.103.910.000	2.103.900.000	100,00 %	10.000	0,00%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	147.567.000	147.566.000	100,00 %	1.000	0,00%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	2.464	27,38 %	6.536	72,62 %
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9.893.000	9.891.840	99,99 %	1.160	0,01%
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.088.000	2.085.120	99,86 %	2.880	0,14%
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	4.900.000	100,00 %	0	0,00%
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.979.000	8.690.400	96,79 %	288.600	3,21%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	41.024.000	34.802.000	84,83 %	6.222.000	15,17 %
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6.600.000	6.600.000	100,00 %	0	0,00%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.287.973.000	1.281.941.877	99,53%	6.031.123	0,47%
002.0A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	383.996.000	381.970.151	99,47%	2.025.849	0,53%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	328.996.000	326.970.535	99,38 %	2.025.465	0,62%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	55.000.000	54.999.616	100,00 %	384	0,00%
002.0B	Langganan Daya dan Jasa	181.931.000	181.586.895	99,81%	344.105	0,19%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	170.664.000	170.656.751	100,00 %	7.249	0,00%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.360.000	6.026.900	94,76 %	333.100	5,24%
522112	Belanja Langganan Telepon	1.092.000	1.088.244	99,66 %	3.756	0,34%
522113	Belanja Langganan Air	540.000	540.000	100,00 %	0	0,00%
522141	Belanja Sewa	3.275.000	3.275.000	100,00 %	0	0,00%
002.0C	Pemeliharaan Kantor	529745000	526426462	99,37%	3318538	0,63%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	292.220.000	292.219.927	100,00 %	73	0,00%
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	74.958.000	74.957.125	100,00 %	875	0,00%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	162.567.000	159.249.410	97,96 %	3.317.590	2,04%
002.0D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	100.861.000	100.791.875	99,93%	69.125	0,07%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	37.741.000	37.671.875	99,82 %	69.125	0,18%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63.120.000	63.120.000	100,00 %	0	0,00%
002.0E	Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim	54.480.000	54.453.333	99,95%	26.667	0,05%
522141	Belanja Sewa	54.480.000	54.453.333	99,95%	26.667	0,05%
002.0G	Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding	33.360.000	33.239.161	99,64%	120.839	0,36%

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.360.000	33.239.161	99,64%	120.839	0,36%
002.0H	Konsultasi Ke KPPN/KANWIL/KPKNL /BKN	3.600.000	3.474.000	96,50%	126.000	3,50%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.600.000	3.474.000	96,50%	126.000	3,50%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	47.500	15,83 %	252.500	%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	47.500	15,83 %	252.500	84,17 %
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	47.500	15,83 %	252.500	84,17 %
051.0A	Dokumen Pemantauan Dan Evaluasi	300.000	47.500	15,83 %	252.500	84,17 %
521211	Belanja Bahan	300.000	47.500	15,83 %	252.500	84,17 %

2. DIPA 03 Badan Urusan Administrasi kode satker 400371 dengan SP DIPA-005.03.2.400371/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan total pagu awal sebesar Rp. 274.700.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Selama tahun 2025 melakukan revisi sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39. Pelaksanaan Revisi DIPA 400371 Tahun 2025

No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	2 Desember 2023	Rp 274.700.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	7 Februari 2025	Rp 274.700.000	Pemutakhiran KPA
3	Revisi Ke- 2	22 Februari 2025	Rp 274.700.000	Revisi Penyesuaian Anggaran Mahkamah Agung RI TA 2025
4.	Revisi Ke- 3	21 Maret 2025	Rp 274.700.000	Revisi Buka Blokir Mahkamah Agung TA. 2025
5.	Revisi Ke- 4	21 April 2025	Rp 274.700.000	Hal III DIPA
6	Revisi Ke- 5	21 Mei 2025	Rp 274.700.000	Pemutakhiran KPA
7	Revisi Ke- 6	8 Juli 2025	Rp 274.700.000	Hal III DIPA
8	Revisi Ke- 7	23 Juli 2025	Rp 274.700.000	Pemutakhiran KPA
9	Revisi Ke- 8	9 Oktober 2025	Rp 274.700.000	Hal III DIPA
10	Revisi Ke- 9	24 Oktober 2025	Rp 272.450.000	Revisi DJA
11	Revisi Ke- 10	27 Oktober	Rp 272.450.000	Pemutakhiran KPA

		2025		
12	Revisi Ke- 11	14 November 2025	Rp 272.450.000	Pemutakhiran KPA
13	Revisi Ke- 12	4 Desember 2025	Rp 272.450.000	Pemutakhiran KPA
14	Revisi Ke – 13	11 Desember 2025	Rp 272.450.000	Pemutakhiran KPA

Dengan realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2024 sebesar 270.988.975,- atau 99,46% dari jumlah pagu sebesar Rp 272.450.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 40. Realisasi Anggaran DIPA 400371 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025

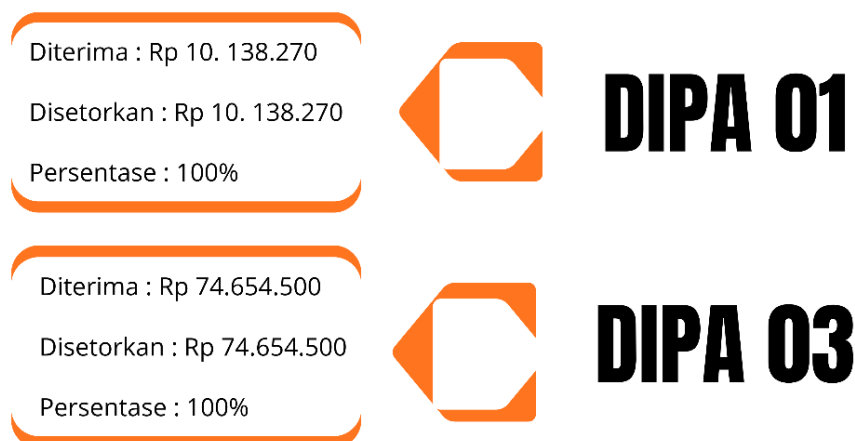
Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detail	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	272.450.000	270.988.975	99,46 %	1.461.025	0,54%
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	272.450.000	270.988.975	99,46 %	1.461.025	0,54%
BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	272.450.000	270.988.975	99,46 %	1.461.025	0,54%
AEA	Koordinasi	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00%
AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00%
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00%
052.0A	KIMWASMAT	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00%
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	235.700.000	234.238.975	99,38 %	1.461.025	0,62%
BCA.U0 3	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	235.700.000	234.238.975	99,38 %	1.461.025	0,62%

051	Pendaftaran Berkas Perkara	139.151.000	139.125.950	99,98 %	25.050	0,02%
051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	139.151.000	139.125.950	99,98 %	25.050	0,02%
521211	Belanja Bahan	2.943.000	2.925.000	99,39 %	18.000	0,61%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	136.208.000	136.200.950	99,99 %	7.050	0,01%
052	Penetapan hari sidang	5.232.000	5.219.300	99,76 %	12.700	0,24%
052.0A	TANPA SUB KOMPONEN	5.232.000	5.219.300	99,76 %	12.700	0,24%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.232.000	5.219.300	99,76 %	12.700	0,24%
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	5.542.000	5.530.650	99,80 %	11.350	0,20%
053.0A	TANPA SUB KOMPONEN	5.542.000	5.530.650	99,80 %	11.350	0,20%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.542.000	5.530.650	99,80 %	11.350	0,20%
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan	49.280.000	48.740.000	98,90 %	540.000	0,00%
054.0A	TANPA SUB KOMPONEN	49.280.000	48.740.000	98,90 %	540.000	1,10%
521211	Belanja Bahan	49.280.000	48.740.000	98,90 %	540.000	1,10%
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	5.346.000	5.170.225	96,71 %	175.775	3,29%
055.0A	TANPA SUB KOMPONEN	5.346.000	5.170.225	96,71 %	175.775	3,29%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.346.000	5.170.225	96,71 %	175.775	3,29%
056	Minutasi/Upaya hukum	7.717.000	7.687.000	99,61 %	30.000	0,39%
056.0A	TANPA SUB KOMPONEN	7.717.000	7.687.000	99,61 %	30.000	0,39%
521211	Belanja Bahan	7.717.000	7.687.000	99,61 %	30.000	0,39%
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	10.582.000	10.251.450	96,88 %	330.550	3,12%
057.0A	TANPA SUB KOMPONEN	10.582.000	10.251.450	96,88 %	330.550	3,12%

521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.582.000	10.251.450	96,88 %	330.550	3,12%
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	12.850.000	12.514.400	97,39 %	335.600	2,61%
058.0A	TANPA SUB KOMPONEN	12.850.000	12.514.400	97,39 %	335.600	2,61%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.850.000	12.514.400	97,39 %	335.600	2,61%
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00%
QBA.03 2	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00%
051	Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00%
051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00%
522131	Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00%

Selain itu, terdapat pengelolaan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Simalungun baik PNBP DIPA 01 maupun PNBP DIPA 03, dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 6. Penerimaan PNBP 2025



Selama tahun 2025 Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mendapatkan berbagai penghargaan antara lain:

1. Penghargaan IKPA Terbaik di lingkungan satuan kerja mitra KPPN Pematangsiantar DIPA 03



2. Penghargaan Bendahara Teladan di lingkungan kerja mitra KPPN Pematangsiantar semester 1 T.A. 2025

Gambar 7. Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar.





B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana



B.1 Kendaraan Dinas

Tabel 41. Keadaan Kendaraan Dinas TA. 2025

NO	URAIAN	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1	Innova Zenix	2023	v			Pemkab
2	Kijang Innova 1002 T	2008		v		MARI
3	Kijang Innova 1265 T	2011	v			MARI
4	Kijang Innova 1469 T	2025	v			MARI
II	Kendaraan Roda 2					
1	Mega Pro 2376 T	2008	v			MARI
2	Supra 125 2377 T	2008	v			MARI
3	Supra 125 2006 T	2006	v			MARI
4	Supra 125 2005 T	2006	v			MARI

B.2 Rumah Dinas

Tabel 42. Keadaan Rumah Dinas TA. 2025

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	v			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	V			
3	Rumah Dinas Hakim	3	V			
4	Rumah Dinas Panitera	1	V			
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	v			

B.3 Sarana Dan Prasarana

Tabel 43. Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas TA. 2025

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
I Sarana Prasarana Gedung			
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	
4.	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Media Center	1	
7	Ruang Dyk	1	
8	Ruang Perpustakaan	1	
9	Ruang Sidang Umum	3	
10	Ruang Sidang Anak	1	
11	Ruang Tahanan	3	
12	Ruang PTSP	1	
13	Ruang Posbakum	1	

14	Ruang Tamu Terbuka	1	
15	Ruang Umum dan Keuangan	1	
16	Ruang Kepegawaian	1	
17	Ruang PTIP	1	
18	Ruang Arsip	1	
19	Ruang Panitera Pengganti	1	
20	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1	
21	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana	1	
22	Ruang Kepaniteraan Muda Perdata	1	
23	Ruang Mediasi dan Diversi	1	
24	Ruang Kaukus	1	
25	Ruang Kesehatan	1	
26	Ruang Laktasi	1	
27	Ruang Advokat	1	
28	Ruang Jaksa	1	
29	Ruang Ramah Anak Perempuan	1	
30	Ruang Ramah Anak Laki - Laki	1	
31	Ruang BAPAS/Pekerja Sosial	1	
32	Ruang Tunggu Sidang/Mediasi	1	
33	Ruang Kantin Pegawai	1	
34	Ruang Pantri	1	
35	Ruang Janitor	1	
36	Ruang Ruang ATK	1	
37	Toilet Pegawai	2	
38	Toilet Pengunjung Perempuan	1	
39	Toilet Pengunjung Laki-laki	1	
40	Toilet Disabilitas	2	
41	Toilet Pengunjung	1	
42	Kantin Pengunjung	1	
43	Parkir Sepeda Motor Pegawai	1	
44	Musala	1	
45	Rumah Genset	1	

II Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Kipas Angin	9	
2	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	
3	Loudspeaker	5	
4	Bracket Standing Peralatan	1	
5	Server	4	
6	CCTV - Camera Control Television System	2	
7	Mesin Absensi	1	
8	Rak Peralatan	1	
9	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	
10	Alat Kantor Lainnya	1	
11	Bangku Panjang Besi/Metal	7	
12	Microphone	2	
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	
14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	
15	Mesin Antrian	1	
16	Microphone/Wireless MIC	1	
17	Sice	7	
18	Microphone Table Stand	6	
19	P.C Unit	27	

20	Lap Top	22	
21	Switch	10	
22	Lemari Besi/Metal	2	
23	White Board	3	
24	Meja Rapat	3	
25	Meja Resepsionis	1	
26	Telephone Mobile	1	
27	Mic Conference	3	
28	Palu Sidang	2	
29	Audio Amplifier	1	
30	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	
31	Firewall	1	
32	Camera Conference	1	
33	Tablet PC	2	
34	Kursi Besi/Metal	131	
35	Bangku Panjang Kayu	18	
36	A.C. Split	32	
37	Local Area Network (LAN)	1	
38	Tiang Bendera	4	
39	Wireless Access Point	12	
40	Lemari Kayu	21	
41	Ethernet Converter	7	
42	Kursi Kayu	8	
43	Sound System	2	
44	Lambang Instansi	1	
45	Komputer Jaringan Lainnya	1	
46	Rak Server	4	
47	Router	1	
48	Filing Cabinet Besi	10	
49	Brandkas	2	
50	Meja Kerja Kayu	93	
51	Facsimile	1	
52	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	
53	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	
54	Rak Besi	9	
55	LCD Monitor	10	
56	Video Monitor	1	
57	Genset	1	
58	Monografi	53	
59	Stationary Generating Set	1	



C. Pengelolaan Teknologi Informasi



Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri Simalungun menepatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis IT

terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing – masing aplikasi dilakukan secara rutin. Pengadilan Negeri Simalungun telah dilengkapi dengan sistem IT yang mumpuni, berikut perangkat keras IT yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun :

C.1 Perangkat Lunak (*Software*)

C.1.1 Website Pengadilan Tinggi Simalungun

(www.pn-simalungun.go.id)

Yang mana isi dalam website Pengadilan Negeri

Simalungun telah disesuaikan

dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor

1364/DJU/SK/HM.02.3/ 5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.



C.1.2 Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi

administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk

pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal

pengadilan. Sampai dengan saat ini SIPP Pengadilan Negeri Simalungun secara aktif melakukan update sampai dengan versi 6.0.1 dan sinkronisasi data SIPP ke Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung.



C.1.3 SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)

Sistem Informasi Kepegawaian

yang selanjutnya

disingkat SIKEP adalah

pengelolaan data kepegawaian secara elektronik melalui sistem



informasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pegawai diantaranya untuk abensi online, proses pembaharuan data pegawai, dus, duk dan lain sebagainya.

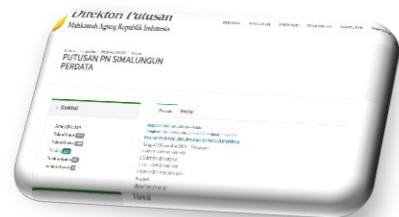
C.1.4 E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi tersebut adalah suatu revolusi bagi dunia peradilan karena dalam aplikasi tersebut telah mendukung e-Filing (Pendaftaran Online), e-Payment (Pembayaran Online), eSummons (Panggilan Elektronik) dan e-Litigasi (Persidangan Online).



C.1.5 Direktori Putusan

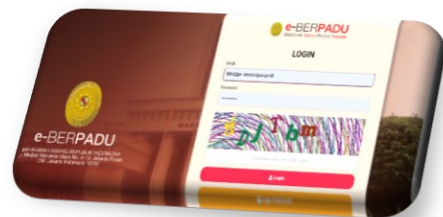
Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk



mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.

C.1.6 e-Berpadu

e-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi yang dipergunakan untuk



pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, antara lain: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin pembantaran,

permohonan izin besuk secara elektronik, penetapan diversi, permohonan izin pinjam pakai barang bukti dan sebagainya.

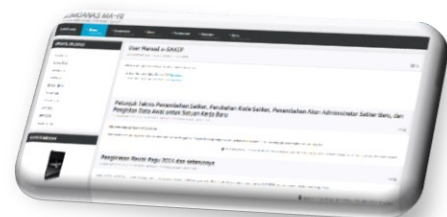
C.1.7 E-Iplans

Sebuah Sistem Untuk Menyusun Anggaran Dengan Tahapan Berjenjang Pada Satuan Kerja Di Bawah Mahkamah Agung RI.



C.1.8 Komdanas

Komdanas merupakan singkatan dari Komunikasi Data Nasional sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.



C.1.9 MIS (Monitoring Implementasi SIPP)

Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau penerapan penggunaan aplikasi SIPP.



C.1.10 EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)

Salah satu aplikasi berbasis website dari Mahkamah Agung yang digunakan oleh Badan Peradilan Umum untuk memantau kinerja dari Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.



C.1.11 Dan aplikasi pendukung kinerja lainnya seperti PTSP, e-Survey, e-BIMA, Pelaporan Badilum, Simari, e-Sadewa, e-Survei, dll.

C.2 Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun berupa :

Tabel 44. Keadaan Server 2025

No	Nama Barang	Type/Merk	Keterangan
1	Server	Server <i>fujitsu</i> RX2520M5 32 GB	server Tipe A Satker 3T
2	Server	Server RX2520M5 w/win storage server	Server Storage Eselon 1
3	Laptop	Fujitsu intel core i3	Laptop
4	Rak server	AR3104 RAK dan PDU - APC	Rak Server Room
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS - APC SMT2200RM12UNC	UPS
6	Rak Server	Indorack RAK PDU	Rack Network Wallmount
7	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Distribusi Tipe 2
8	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Access PoE
9	Ethernet Converter	Ruckus 10GbE Direct Attach 10G-SFP-TWX-0101	DAC
10	Wireless Access Point	Ruckus R550-WW00	Access Point
11	Firewall	Palo Alto Networks PA-220	Firewall

Pengadilan Negeri Simalungun juga dilengkapi dengan jaringan internet menggunakan provider fibernet, dengan kecepatan 150 Mbps *dedicated*. Tentu saja hal itu sangat membantu dalam mengimplementasikan SIPP pada Pengadilan Negeri Simalungun yang saat ini menggunakan SIPP versi 6.0.1 dan untuk aplikasi MIS menggunakan versi 2.5 Versi tersebut merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung RI.

C.3 Implementasi E-Court Pengadilan Negeri Simalungun

Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan dengan menerima pendaftaran perkara perdata melalui www.ecourt.mahkamahagung.go.id dan juga telah melaksanakan persidangan secara e-litigasi. Adapun data perkara yang melalui e-court dan e-litigasi adalah sebagai berikut :

Tabel 45. Keadaan Perkara E-court dan E-Litigasi Tahun 2025

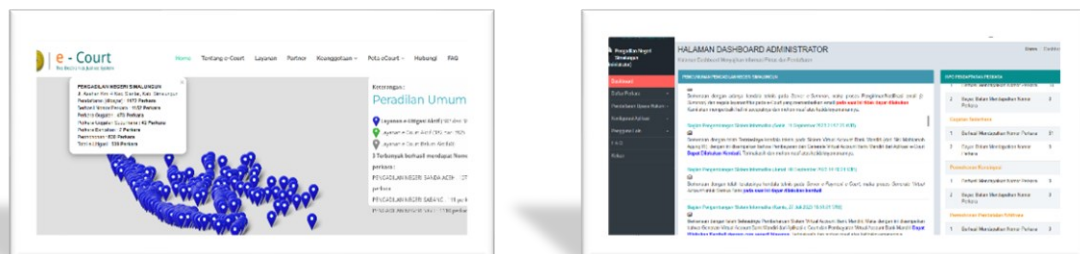
No	Perkara	Perkara Masuk Non E-Court	E-Court	E-Litigasi
1	Gugatan	184	184	184

2	Permohonan	260	260	260
3	Gugatan Sederhana	10	10	10
4	Bantahan	4	4	4
Jumlah		458	458	458

Sebagai salah satu dukungan terhadap implementasi *e-Court*, Pengadilan Negeri Simalungun juga telah menyediakan Meja *e-Court* dan Duta *E-Court* dimana para calon pengguna terdaftar dan atau pengguna lain dapat dibantu untuk proses mendapatkan akun. Selain itu, Meja *e-Court* juga dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Terdaftar dan atau Pengguna Lain untuk mendaftarkan perkaranya.

Banner dan brosur yang memuat berbagai informasi tentang *e-Court* juga tersedia pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Simalungun. Saat ini sudah tidak ada kendala yang dihadapi di Pengadilan Negeri Simalungun dalam implementasi *e-court* dan *e-litigasi* karena para pencari keadilan sudah banyak yang melek teknologi dan merasakan kemudahan dan manfaat yang luar biasa dengan adanya *e-court* dan *e-litigasi*.

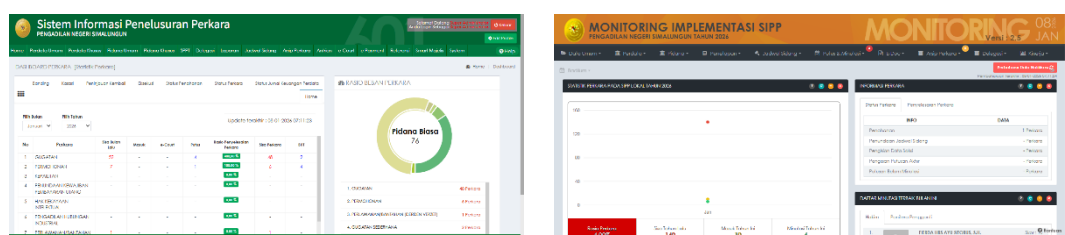
Gambar 8. Peta E-Court Seluruh Indonesia dan Tampilan E-Court Pengadilan Negeri Simalungun



C.4 Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Simalungun

Pengadilan Negeri Simalungun saat ini menggunakan SIPP versi 6.0.1 dan untuk aplikasi MIS menggunakan versi 2.5. Versi tersebut merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung RI.

Gambar 9. Tampilan SIPP dan MIS Pengadilan Negeri Simalungun



BAB V

PENINGKATAN

PELAYANAN

PUBLIK



A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN



Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga pemerintahan pemegang kekuasaan yudikatif di negara Republik Indonesia merupakan institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam bidang peradilan. Tuntutan dan tanggung jawab akan layanan masyarakat yang lebih baik adalah hal pokok yang harus dicapai dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung dan Lembaga-Lembaga Peradilan dibawahnya. Hal ini sangatlah urgent jika dikaitkan dengan Visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Badan Peradilan yang agung tidak mungkin terwujud tanpa adanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai lembaga dibawah Mahkamah Agung sudah barang tentu juga harus meningkatkan kualitas Pelayanannya apalagi jika dikaitkan dengan Visi Pengadilan Negeri Simalungun yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”. Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Badan Peradilan tingkat banding haruslah mampu memberikan pelayanan prima dan paripurna guna mencapai keagungannya. Evaluasi dan perbaikan periodik sangat diperlukan guna perbaikan pelayanan tersebut.

Untuk mendapat acuan yang lebih terukur Pengadilan Negeri Simalungun harus melakukan pengukuran tingkat Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri secara periodik, ilmiah dan bertanggung jawab. Inilah yang kemudian dijadikan acuan dalam mengevaluasi pelayanan dan perbaikan ke depan. Seiring dengan hal itu Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survei ini haruslah dilakukan dengan baik oleh Pengadilan Negeri Simalungun guna memperbaiki dan meningkatkan pelayanan masyarakatnya secara periodik.

A.1 Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Simalungun ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesepuluh ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat pilihan jawaban. Adapun penskoran analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Simalungun ini digunakan analisis statistik deskriptif. Kesepuluh ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat pilihan jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Simalungun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 46 : Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (IPK)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

A.2 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan

Kuesioner yang terisi dengan lengkap sejumlah 204 angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Simalungun dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Simalungun sebesar 3,94 atau 98,45% berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 88,31 – 100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Simalungun yang telah ditetapkan sebesar 80%. Hasil tersebut berada di atas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Simalungun. Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 47 : Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Simalungun

No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,93	Sangat Baik	6
2	Prosedur	3,94	Sangat Baik	4
3	Waktu Pelayanan	3,87	Sangat Baik	9
4	Biaya/Tarif	3,93	Sangat Baik	7
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,95	Sangat Baik	3
6	Kompetensi Pelaksana	3,92	Sangat Baik	8
7	Perilaku Pelaksana	3,96	Sangat Baik	2
8	Sarana dan Prasarana	3,93	Sangat Baik	5
9	Penanganan Pengaduan	3,99	Sangat Baik	1

A.2.1 Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,93** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 48.1. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

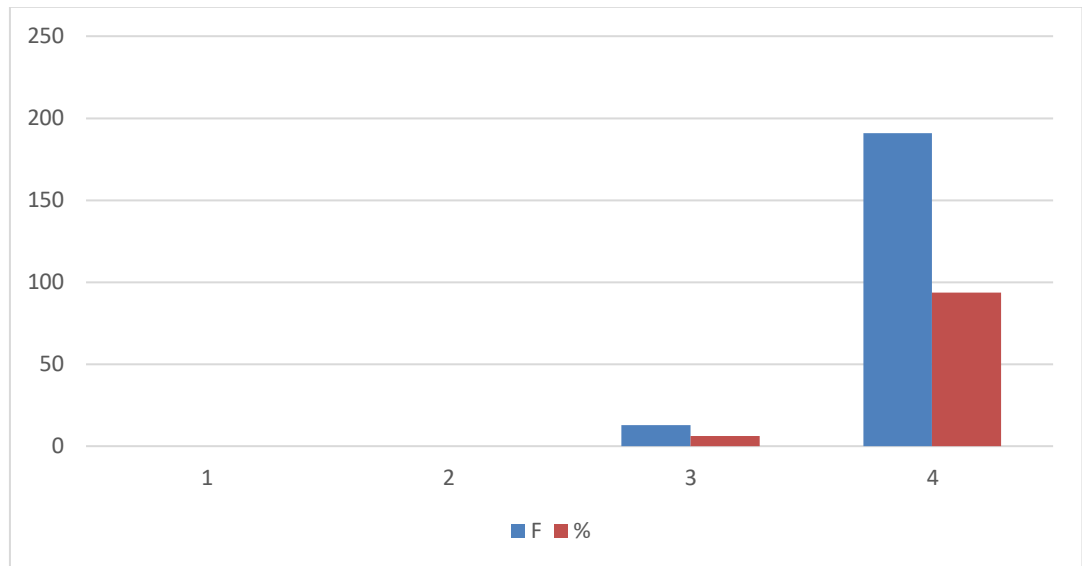
Ruang Lingkup: Persyaratan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Sesuai	1	0	0,00
2.	Kurang Sesuai	2	0	0,00
3.	Sesuai	3	13	6,37
4.	Sangat Sesuai	4	191	93,63
Jumlah			204	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 10.1. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

Ruang Lingkup: Persyaratan



A.2.2 Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,94** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori “**SANGAT BAIK**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 48.2 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

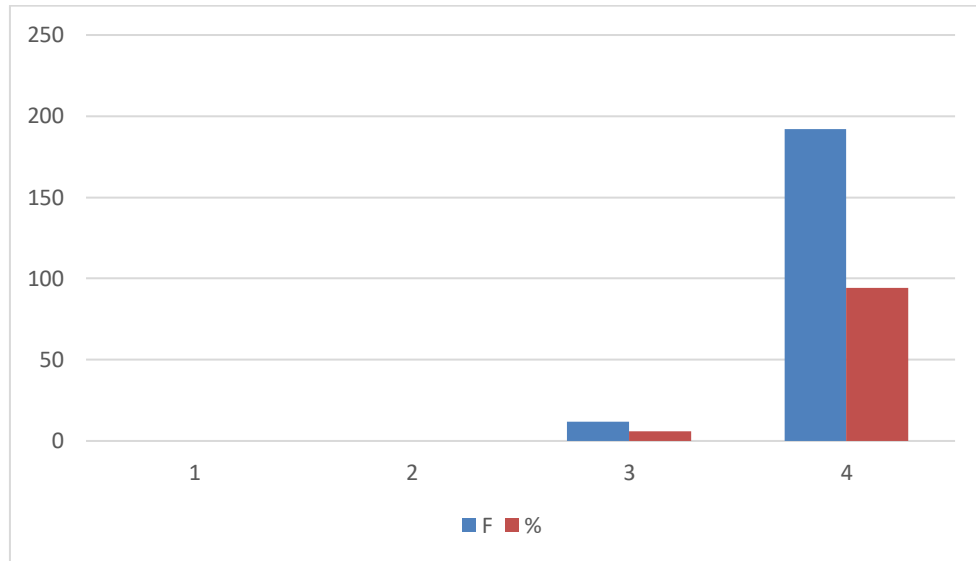
Ruang Lingkup : Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Mudah	1	0	0,00
2.	Kurang Mudah	2	0	0,00
3.	Mudah	3	12	5,88
4.	Sangat Mudah	4	192	94,12
Jumlah			204	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 11.2 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

Ruang Lingkup: Prosedur



A.2.3 Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,87** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori **"SANGAT BAIK"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

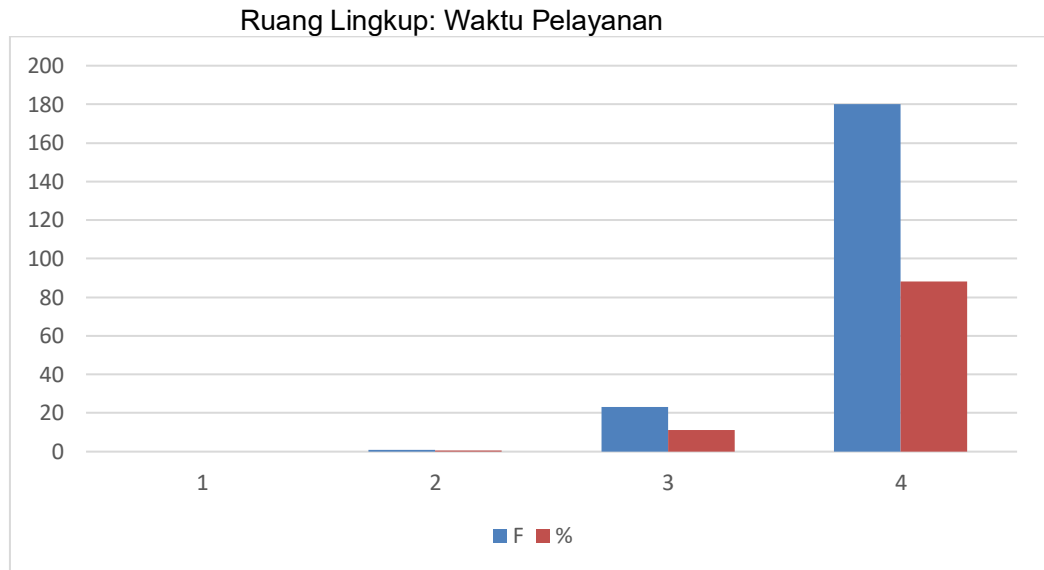
Tabel 48.3. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Cepat	1	0	0,00
2.	Kurang Cepat	2	1	0,50
3.	Cepat	3	23	11,27
4.	Sangat Cepat	4	180	88,23
Jumlah			204	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 10.3. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun



A.2.4 Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,93** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini:

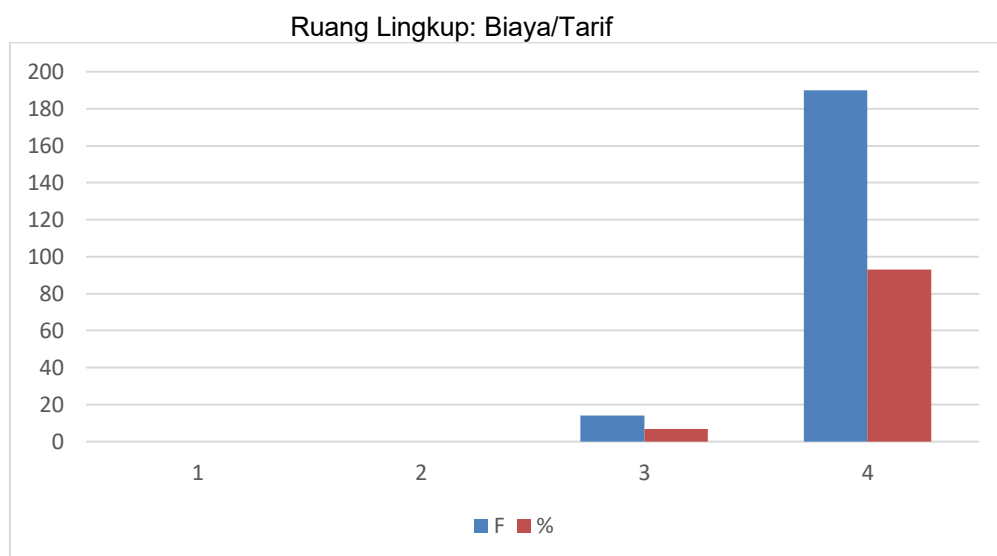
Tabel 48.4. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Mahal	1	0	0,00
2.	Cukup Mahal	2	0	0,00
3.	Murah	3	14	6,86
4.	Gratis	4	190	93,14
Jumlah			204	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 10.4. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun



A.2.5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,95** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

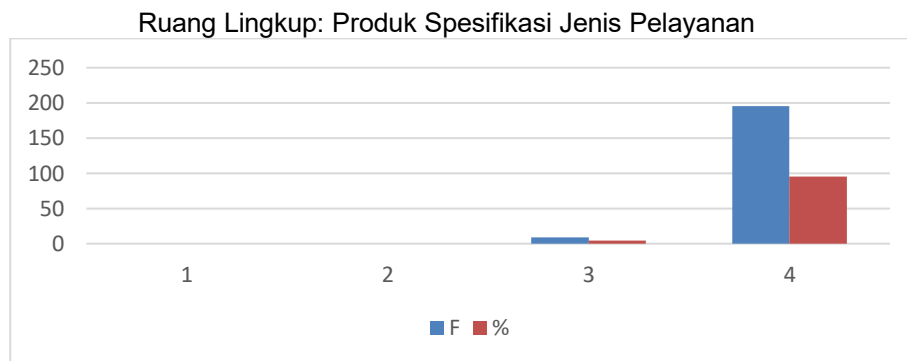
Tabel 48.5 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Sesuai	1	0	0,00
2.	Kurang Sesuai	2	0	0,00
3.	Sesuai	3	9	4,41
4.	Sangat Sesuai	4	195	95,59
Jumlah			204	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 10.5. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun



A.2.6 Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,92** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 48.6. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

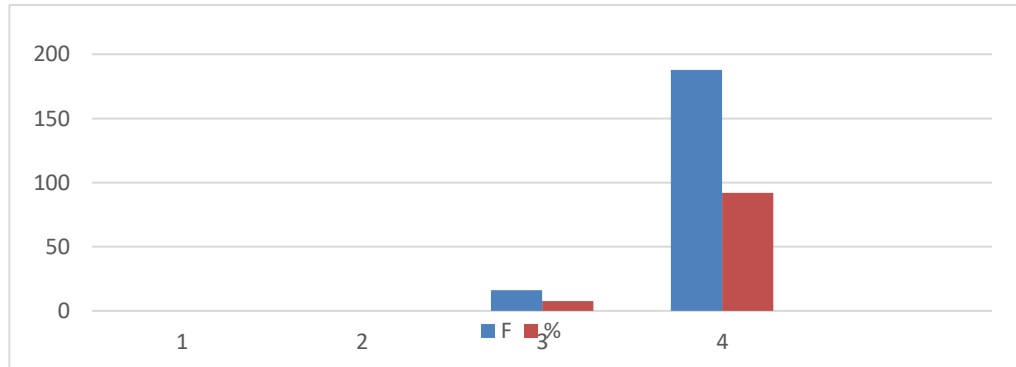
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Kompeten	1	0	0,00
2.	Kurang Kompeten	2	0	0,00
3.	Kompeten	3	16	7,84
4.	Sangat Kompeten	4	188	92,16
Jumlah			204	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 10.6. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana



A.2.7 Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,96** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 48.7. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

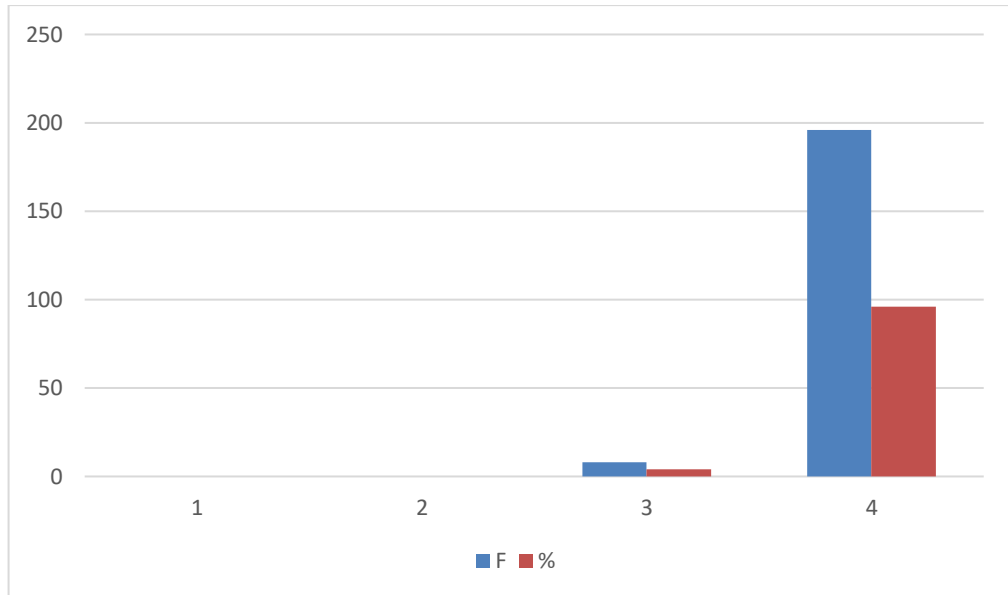
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Sopan dan Ramah	1	0	0,00
2.	Kurang Sopan dan Ramah	2	0	0,00
3.	Sopan dan Ramah	3	8	3,93
4.	Sangat Sopan dan Ramah	4	197	96,07
Jumlah			204	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 10.7. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana



A.2.8 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah penggunaan fasilitas guna pemuasan pelayanan publik. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor adalah sebesar **3,93** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sarana dan prasarana katagori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sarana dan prasarana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 48.8. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

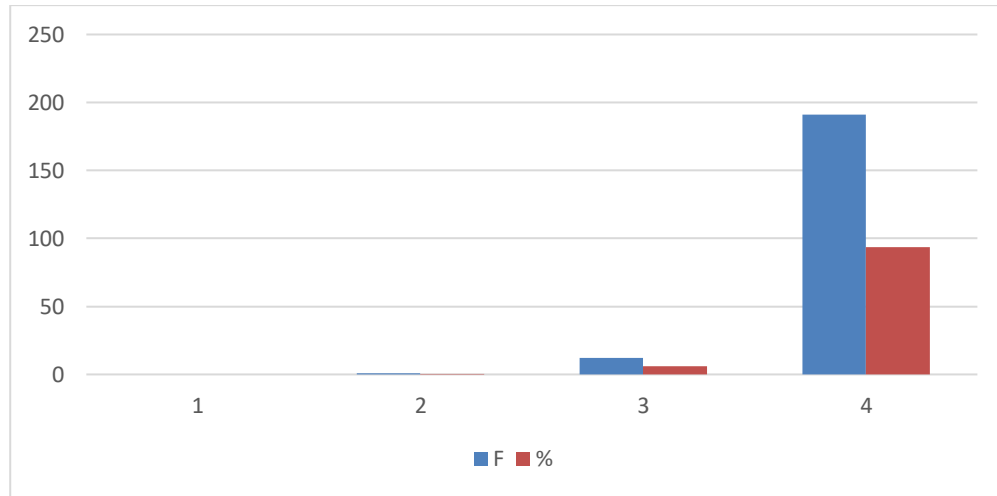
Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak ada	1	0	0,00
2.	Ada tetapi tidak berfungsi	2	1	0,5
3.	Berfungsi kurang maksimal	3	12	5,88
4.	Dikelola dengan baik	4	191	93,62
Jumlah			204	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 10.8. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana



A.2.9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penangan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor adalah sebesar **3,99** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 katagori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada katagori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 48.9. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

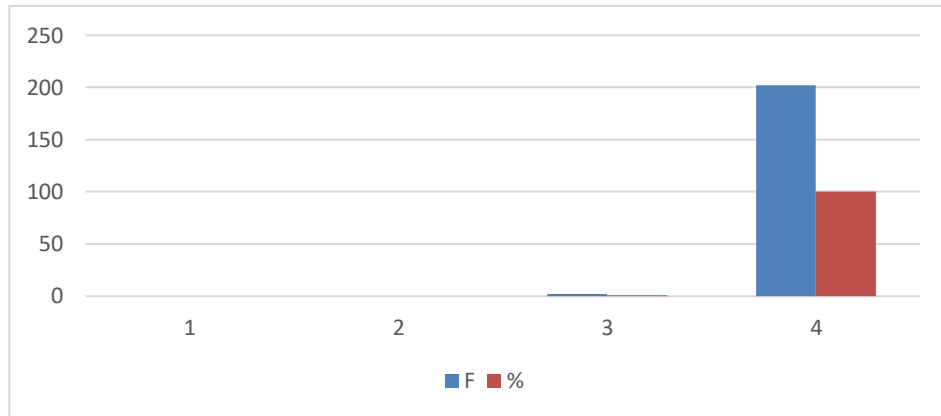
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Buruk	1	0	0,00
2.	Cukup	2	0	0,00
3.	Baik	3	2	0,98
4.	Sangat Baik	4	202	99,02
Jumlah			204	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 10.9 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Simalungun

Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan





B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

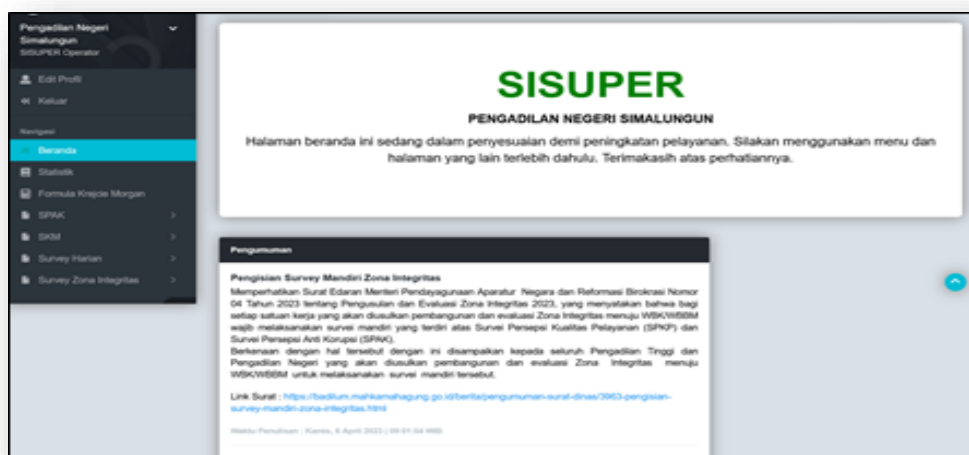


PTSP Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B, yang merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu, sudah aktif dilaksanakan sejak tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B Nomor 14/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2023 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B.

Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada ketentuan yang ada pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tata ruang PTSP Pengadilan Negeri Simalungun juga sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan tersebut. Pada tahun 2019, PTSP dilengkapi dengan Meja Inzaghe dan Meja e-Court sesuai amanat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat dua kali dalam setahun sejak tahun 2016. Survei dilaksanakan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dan dilakukan secara elektronik dengan aplikasi SiSUPER. Pelaksanaan survei dilakukan empat kali dalam setahun sejak tahun 2021 sesuai dengan SK Dirjen Badlum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badilum dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Gambar 11. Tampilan Aplikasi Survei SiSUPER



Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 49. Keadaan Pelayanan PTSP Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Jumlah Layanan di PTSP	Jumlah Permohonan Layanan	Keterangan
1	PN Simalungun	4	Hukum : 1.403 Pidana : 1.178 Perdata : 1.115 Umum : 233	3.929

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun mengikuti Lomba Penilaian Kinerja Pada Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam lomba penilaian tersebut Pengadilan Negeri Simalungun berhasil lolos sampai ke tahap II sehingga dapat meneruskan proses lomba ditahap III yaitu wawancara secara *daring* pada Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana tercantum dalam pengumuman Nomor 205/DJU/PENG.KP3.4.4/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025. Hal ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan keterbukaan

informasi yang akuntabel dan transparan. Pengadilan Negeri Simalungun optimis dapat mengikuti Tahap III dengan baik sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memberikan pelayanan prima dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Gambar 12 : Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)



C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Sebagai instansi yang bertugas melayani masyarakat, Pengadilan Negeri Simalungun terus meningkatkan pelayanan publik dengan membuat inovasi, baik dari fasilitas yang ada, maupun dari pelayanannya. Hal ini tak lain sebagai salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung yaitu Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, dan pelayanan yang prima. Pengadilan Negeri Simalungun juga memberikan informasi secara online yaitu bisa melalui website dan media sosial lainnya.

Pengadilan Negeri Simalungun juga telah membentuk Tim Penanggung Jawab Inovasi sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor

119/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 serta rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi yang ada.

C.1 Jenis Inovasi Pelayanan Publik

a. E-Pelita

Gambar 13. Deskripsi Inovasi E-Pelita



e-PELITA (Permohonan Salinan Putusan Secara Elektronik)

Inovasi berbasis *google form* yang memudahkan para pengguna layanan untuk mengajukan permohonan salinan putusan berkekuatan hukum tetap secara *online* dengan mengisi form yang tersedia dan mengunggah persyaratan yang diperlukan.

Pengguna Inovasi :
Masyarakat Umum
Advokat

CARA KERJA

Pengguna layanan mengakses e-Pelita melalui website Pengadilan Negeri Simalungun, <https://bit.ly/e-pelita>, atau dengan memindai QR code pada brosur e-Pelita melalui ponsel pintar.

Pada tampilan awal e-Pelita, pengguna layanan memilih pihak berperkara atau tidak.

Kemudian pengguna layanan dapat memilih tujuan permohonan salinan putusan yang diajukan, mengisi data-data yang diperlukan, serta mengunggah persyaratan secara elektronik.

Pengguna lalu mengirimkan form permohonan dengan menekan tombol submit atau kirim.

Permohonan yang masuk akan diterima oleh staf Kepaniteraan Hukum untuk diproses sesuai dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengguna layanan dapat mengambil salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTSP Hukum Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

PETUGAS / OPERATOR

Staf Kepaniteraan Hukum.

b. E-Pesona

Gambar 14. Deskripsi Inovasi E-Pesona



e-Pesona (Elektronik Form Penilaian Personal)

Form elektronik penilaian personal untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyangga disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebelum berkunjung ke Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengguna Inovasi :
Kelompok rentan khususnya penyangga disabilitas.

CARA KERJA

Pengguna layanan mengakses e-Pesona melalui <https://bit.ly/e-Pesona> atau dengan memindai QR code pada brosur e-Pesona melalui ponsel pintar.

Pada tampilan formulir e-Pesona, pengguna layanan mengisi data-data yang diperlukan serta menjawab pertanyaan sesuai dengan jenis dan kebutuhan disabilitas.

Pengguna lalu mengirimkan form permohonan dengan menekan tombol submit atau kirim.

Formulir penilaian personal yang telah dikirimkan akan diterima dan diproses oleh Petugas PTSP sesuai dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.

PETUGAS / OPERATOR

Petugas PTSP.

c. Brodi

Gambar 15. Deskripsi Inovasi Brodi
BRODI (Brosur Digital)



BRODI (Brosur Digital)

Brosur digital yang didesain secara unik dan menarik berisi informasi Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Simalungun termasuk mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu, dan biaya (jika ada) atas layanan di Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengguna Inovasi :
Jaksa
Penyidik
Masyarakat umum
Advokat
Stakeholder lainnya

CARA KERJA

Masyarakat / stakeholder lainnya dapat mengakses BRODI melalui website Pengadilan Negeri Simalungun pada alamat <https://www.pn-simalungun.go.id>.

Masuk ke menu Layanan Publik, kemudian pilih menu E-Brosur (BRODI).

Cunakan aplikasi pemindai QR code pada ponsel pintar untuk memindai QR code pada halaman BRODI.

Pilih / Klik jenis layanan yang ingin dilihat, informasi tersebut akan ditampilkan dalam bentuk brosur digital pada perangkat elektronik yang digunakan.

PETUGAS / OPERATOR

Aplikasi dapat digunakan secara mandiri tanpa bantuan operator.

d. Pangsid

Gambar 16. Deskripsi Inovasi Pangsid

PANGSSID (Panggilan Suara Sidang)



Aplikasi panggilan suara (*announcer*) yang digunakan untuk mempermudah melakukan panggilan kepada para pihak yang akan bersidang di Pengadilan Negeri Simalungun, terutama untuk perkara perdata.

Pengguna Inovasi :
Para pihak yang akan bersidang.

CARA KERJA

PANGSSID merupakan aplikasi untuk menyuarakan panggilan sidang yang dapat diakses oleh petugas jaga sidang melalui alamat <https://192.168.1.106/pangsid>.

PANGSSID dapat digunakan untuk memanggil para pihak yang akan mengikuti persidangan, mengumumkan panggilan untuk rapat bulanan, apel, maupun panggilan kustom lainnya.

Untuk menyuarakan panggilan sidang, petugas jaga sidang dapat memilih nomor perkara sesuai dengan antrian sidang, kemudian memilih para pihak yang akan dipanggil (Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, atau para pihak yang berperkara).

Untuk panggilan kustom lainnya, petugas jaga sidang dapat mengetikkan kalimat yang akan diumumkan melalui menu "Kustom Panggil". Kalimat tersebut kemudian akan diucapkan secara otomatis oleh announcer pada aplikasi PANGSSID.

Adapun untuk menu Panggilan Sidang, PANGSSID telah terintegrasi dengan data dari SIPP Pengadilan Negeri Simalungun.

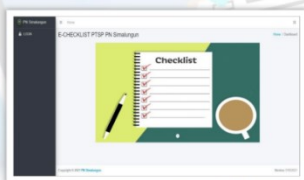
PETUGAS / OPERATOR

Petugas Jaga Sidang.

f. E- Checklist

Gambar 17. Deskripsi Inovasi E-Checklist

E - CHECKLIST (Electronic Checklist)



Aplikasi yang memudahkan petugas PTSP dalam memeriksa kelengkapan berkas-berkas yang diajukan oleh pengguna layanan.

Pengguna Inovasi :
Panitera
Panmud Perdata
Petugas PTSP Meja Perdata
Staf Perdata

CARA KERJA

Petugas PTSP bagian Perdata dapat mengakses e-Checklist melalui alamat <https://192.168.1.106/e-checklist>.

E-Checklist akan menampilkan checklist yang berisi daftar persyaratan yang harus dilengkapi oleh pengguna layanan PTSP bagian Perdata sesuai dengan SPP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.

Apabila persyaratan yang diminta telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, petugas akan memberikan tanda check pada poin yang sesuai di tampilan E-Checklist.

Petugas dapat mengetahui lengkap atau tidaknya persyaratan atas suatu layanan yang diminta dengan melihat poin-poin pada checklist tersebut.

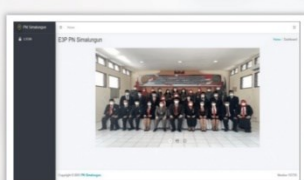
PETUGAS / OPERATOR

Petugas PTSP Bagian Perdata.

g. E3P

Gambar 18. Deskripsi Inovasi E3P

E3P (Elektronik Persiapan Penyelenggaraan Persidangan)



Aplikasi berbasis data SIPP yang berguna untuk memberitahukan status kehadiran para pihak pencari keadilan di Pengadilan Negeri Simalungun kepada Majelis Hakim dan Panitera secara *real-time*, khususnya untuk perkara Perdata.

Pengguna Inovasi :
Hakim
Panitera Pengganti
Petugas Sidang

CARA KERJA

Petugas jaga sidang dapat mengakses E3P melalui alamat <https://192.168.1.106/E3P>.

Petugas dapat login dengan menggunakan user petugas.

Petugas kemudian memilih menu "Lapor Kesiapan Sidang", kemudian memilih menu "Lapor Persidangan".

Petugas memilih nomor perkara para pihak yang telah hadir dan siap untuk mengikuti sidang, kemudian mengisi menu "Kehadiran" dengan nama para pihak yang telah hadir beserta keterangan kehadirannya.

Simpan, kemudian tekan tombol "Kirim".

E3P akan secara otomatis mengirimkan notifikasi bahwa persidangan dapat segera dimulai melalui aplikasi Telegram kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada perkara tersebut.

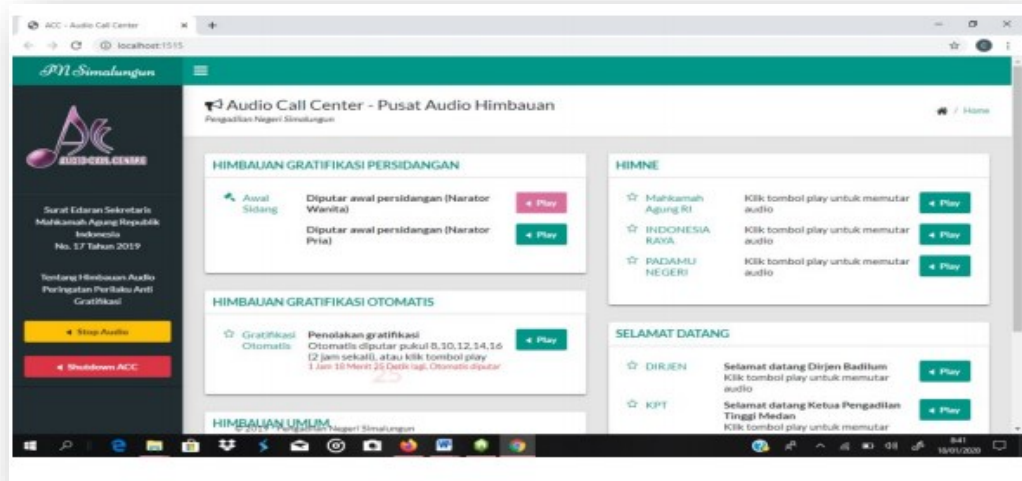
PETUGAS / OPERATOR

Petugas Jaga Sidang.

h. Audio Gratifikasi

Sesuai SE SEKMA RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi, Pengadilan Negeri Simalungun telah memiliki aplikasi yang memudahkan implementasi SEMA tersebut setiap dua jam sekali.

Gambar 19. Deskripsi Inovasi Audio Gratifikasi



- i. Meja *e-Court* PN Simalungun digawangi oleh seorang Duta *e-Court* berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 115/KPN.W2-U16/SK.HK2.4/X/2025 yang memiliki pengetahuan mengenai tata cara penggunaan aplikasi *e-Court* untuk membantu pengguna terdaftar dan pengguna lain yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akun maupun untuk mendaftarkan perkaranya. Duta *e-Court* juga akan dengan senang hati membantu para pihak untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai keuntungan berperkara melalui *e-Court*.

Gambar 20. Duta E-Court Pengadilan Negeri Simalungun



j. PTSP Online

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan peradilan di Lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun perlu adanya inovasi digitalisasi layanan pada PTSP Pengadilan Negeri Simalungun. Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi, maka dibutuhkan pelayanan secara online



yang sangat membantu pengguna pelayanan, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan tepat, melalui aplikasi PTSP Online.

k. Mesin Antrian Sidang

Mesin antrian pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Simalungun berfungsi sebagai sarana pendukung pelayanan publik yang tertib, efektif, dan transparan. Penggunaan mesin antrian ini bertujuan untuk mengatur alur pelayanan agar masyarakat pencari keadilan dapat dilayani secara adil sesuai dengan urutan kedatangan.

Dengan adanya mesin antrian, proses pelayanan menjadi lebih terorganisir karena setiap pengunjung memperoleh nomor antrian secara otomatis sesuai jenis layanan yang dibutuhkan. Hal ini membantu mengurangi penumpukan, meminimalisir kerumunan, serta menciptakan suasana ruang tunggu yang nyaman dan kondusif.

Selain itu, mesin antrian juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan PTSP dengan mempercepat waktu layanan, memudahkan petugas dalam mengelola jumlah pemohon, serta memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai giliran pelayanan. Sistem ini turut mendorong penerapan prinsip pelayanan prima, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pemanfaatan mesin antrian di PTSP Pengadilan Negeri Simalungun merupakan wujud komitmen pengadilan dalam memberikan pelayanan yang profesional, modern, dan sejalan dengan upaya pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Demi meningkatkan produktivitas kinerja para pegawai Pengadilan Negeri Simalungun agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka para pegawai juga aktif untuk melakukan aktivitas di luar pekerjaan seperti kegiatan jasmani dan rohani. Dua aktivitas tersebut bernilai penting karena dapat memberikan efek relaksasi sehingga menjadi produktif dalam menjalani pekerjaan. Kegiatan jasmani seperti olahraga senam yang selalu dilakukan rutin dapat memberikan dampak positif bagi instansi, diantaranya : Olahraga dapat meningkatkan konsentrasi, fokus, dan produktivitas, dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood, dapat meningkatkan sistem imunitas dengan cara membantu antibodi dan lain sebagainya.

Gambar 21 : Kegiatan Senam



Pengadilan Negeri Simalungun juga rutin mengadakan kegiatan Donor Darah yang bekerja sama dengan PMI Kabupaten Simalungun, Kegiatan Pemeriksaan Darah, dan Cek Kesehatan Mata

Gambar 22 : Kegiatan Donor Darah



Gambar 23 : Pemeriksaan Darah



Gambar 24 : Cek Kesehatan Mata



Begitu juga dengan kegiatan rohani, Pengadilan Negeri Simalungun rutin mengadakan pengajian Bersama dan kegiatan Kebaktian untuk yang beragama nasrani. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Simalungun yang beragama muslim dan melakukan doa bersama untuk seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Simalungun yang beragama Nasrani.

Gambar 25 : Kegiatan Keagamaan





BAB VI

PENGAWASAN



A. PENGAWASAN INTERNAL



Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilaksanakan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Umum Nomor 8 Tahun 2004 yang berisi bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan para staff. Selain itu juga, pengawasan internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Bentuk pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Simalungun yaitu pengawasan langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 108/KPN.W2-U16/SK.PW1.1.1/XI/2025 tertanggal 16 September 2025 :

Tabel 50. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat

No	Jabatan Pengawas	Nama Hakim	Jabatan/Gol Ruang
1	Hakim Pengawas Bidang Pidana dan WASMAT	Rumia Rotua A. R. C. Lumbanraja, S.H., M.H.	Penata / III/c
		Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H	Penata Muda Tk. I/ III/b
2	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Penata Tk I/ III/d
		Harya Juang Siregar, S.H.	Penata Muda Tk. I/ III/b
3	Hakim Pengawas PTSP	Glory Audina R. C. Silaban, S.H.	Penata Muda Tk. I/ III/b
4	Hakim Pengawas Bidang Hukum	Satya Frida Lestari, S.H.	Penata Muda Tk. I/ III/b
5	Hakim Pengawas Bidang PTIP	Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.	Pembina / IV/a
6	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan	MIRA HERAWATY, S.H.	Penata Muda Tk. I/ III/b
7	Hakim Pengawas Bidang Keportala	Agnes Monica, S.H.	Penata Muda Tk. I/ III/b

Setiap Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan terhadap kinerja para pejabat dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja
2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan
3. Memberikan saran-saran konstruktif untuk perbaikan
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan
5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.



B. PENGAWASAN



Pengawasan evaluasi di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk penanganan terhadap pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. Berikut tabel pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2024 :

Tabel 51. Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	11
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Pengadilan Tingkat Banding	2
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Badan Pengawas MA-RI	7
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	0
5	Jumlah Pengaduan Yang telah Selesai Ditangani. LHP Telah Disampaikan Kepada Pengadilan Tingakt Banding	11
6	Jumlah Pengaduan Yang telah Selesai Ditangani. LHP Telah Disampaikan Kepada Pengawas MA-RI	11

7	Jumlah Pengaduan Yang Terlapornya Dijatuhi Hukuman Disiplin	0
---	---	---

Adapun evaluasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen peradilan :
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan pencapaian target;
 - c. Pengawasan dan pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor yang mendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi perkara
 - a. Prosedur penerimaan permohonan banding, kasasi, dan PK
 - b. Keuangan perkara;
 - c. Pemberkasan kearsipan dan pelaporan.
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan :
 - a. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - b. Minutasi perkara.
4. Administrasi umum :
 - a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Umum (inventaris barang milik negara, perpustakaan, tata persuratan dan perkantoran serta kebersihan dan keamanan kantor).
5. Kinerja pelayanan publik :
 - a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan SDM;
 - e. Perawatan dan pemeliharaan inventaris;
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian;
 - g. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara;
 - h. Tingkat pengaduan masyarakat.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun telah berhasil memenuhi standar UMPUH dengan meraih predikat **Unggul**. Capaian ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi Pengadilan Negeri Simalungun dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Predikat **Unggul** tersebut mencerminkan keberhasilan Pengadilan Negeri Simalungun dalam menerapkan standar pelayanan yang efektif, transparan, serta didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, capaian ini juga menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pengadilan untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan, khususnya dalam mewujudkan pelayanan yang prima, akuntabel, dan berintegritas. Keberhasilan meraih predikat **Unggul** pada penilaian AMPUH tahun 2025 menegaskan komitmen Pengadilan Negeri Simalungun dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Gambar 25 : Sertifikasi Unggul AMPUH





BAB VII

PENUTUP



A. KESIMPULAN



1. Pengadilan Negeri Simalungun telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
2. Pada tahun 2025 ini, Pengadilan Negeri Simalungun mendapatkan tambahan Hakim sebanyak 7 orang, CPNS 5 orang, serta P3K sebanyak 9 orang sehingga dapat menambah kualitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun. Serta untuk meningkatkan kualitas kinerja tersebut dilakukan dengan berbagai pembinaan internal dan pola mutasi internal yang dilakukan dengan pendekatan *the right person at the right place*, Pengadilan Negeri Simalungun mampu memberikan performa terbaiknya;
3. Pengelolaan anggaran sudah dilakukan dengan baik yang tercermin dari tercapainya realisasi anggaran di atas 99% baik pada DIPA 01 maupun DIPA 03;
4. Dukungan teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital bagi terlaksananya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun serta untuk menyukseskan program Mahkamah Agung dalam proses administrasi perkara di pengadilan berbasis elektronik melalui implementasi *e-Court* dan SIPP, serta e-Berpadu.
5. *E-Court*, SIPP, dan e-Berpadu sudah terimplementasi dan secara konsisten dipergunakan pada Pengadilan Negeri Simalungun;
6. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Simalungun telah dilakukan untuk menjamin pelaksanaan tugas administrasi perkara maupun administrasi umum;



B. REKOMENDASI



Untuk menghadapi tahun 2025 ini, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki beberapa rekomendasi guna mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja aparatur khususnya Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Simalungun yaitu:

1. Perlu diadakan penambahan tenaga teknis Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Agar pelatihan-pelatihan teknis yang berbasis kompetensi terus dilaksanakan untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat peradilan;
3. Diharapkan usulan anggaran yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan kebutuhan *riil* dan skala prioritas dapat dikabulkan. Sehingga kebutuhan akan perangkat pengolah data dapat dipenuhi demi menunjang keberhasilan administrasi perkara di pengadilan berbasis elektronik;
4. Pemenuhan fasilitas pendukung *e-Litigasi* sudah sangat mendesak untuk dilakukan agar tidak terjadi kendala yang dapat mengganggu kelancaran persidangan secara elektronik;
5. Agar terus diadakan pengembangan terhadap aplikasi yang sudah ada, baik itu pendukung administrasi perkara secara elektronik, maupun aplikasi pendukung tugas kepaniteraan dan kesekretariatan lainnya, sehingga data yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang semakin akurat dan akuntabel.

LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 135/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Simalungun yang lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami, maka dipandang perlu membentuk Tim untuk melaksanakan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025;
- b. bahwa pegawai dengan tersebut dalam lampiran ini di pandang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4108/SEK/OT.1.6/12/2023 tentang Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Tahun 2023;

6. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2513/DJU/HK2/XII/2025 tentang permintaan Data Perkara untuk Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 1/KPN/SK.OT1.6/I/202 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Simalungun, dengan susunan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas menginventarisir dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dari sub Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam lingkungan unit kerja Pengadilan Negeri Simalungun serta melaporkan hasil penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 28 Desember 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 135/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 28 Desember 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Pembina
2	Agung Cory F.D Laia, S.H.	Hakim Pengawas Bidang PTIP	Penanggung Jawab
3	Parlin Halomoan Harahap, S.H,M.H.	Panitera	Ketua
4	Ruben H Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Wakil Ketua
5	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris
6	Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Penyaji Data
7	Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.	Panitera Muda Pidana	Penyaji Data
8	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penyaji Data
9	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kasub Bag Keportala	Penyaji Data
10	Ardila Winarti, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Penginput Data
11	M. Rahmansyah Rangkuti, S.Pd.I	Penata Layanan Operasional	Penginput Data

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING





0622-7550426



www.pn-simalungun.go.id



info@pn-simalungun.go.id



[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)